

MODUL

EKONOMI MAKRO



Disusun oleh:
M. Rondhi, SP, MP, Ph.D

JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN /PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JEMBER
2016

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, akhirnya penulisan modul ekonomi Makro, ini dapat diselesaikan. Tujuan utama modul ini ditulis adalah agar mudah dipahami pembaca, terutama pembaca pemula. Namun demikian, menulis buku supaya “terbaca” bukanlah tugas mudah. Apalagi, dalam khasanah ilmu ekonomi makro banyak ahli yang memiliki teori dan pendekatan berbeda.

Modul ini disusun dalam lima bab yaitu (1) pendahuluan tentang ekonomi makro, (2) Pengukuran pendapatan nasional, (3) kerangka belajar ekonomi makro, (4) model keseimbangan pengeluaran dua sektor, (5) model keseimbangan dengan campur tangan pemerintah. Buku ini merupakan embrio awal dari buku ajar Ekonomi Makro yang akan disusun dengan lebih lengkap.

Modul ini diawali dengan sebuah pengantar yang secara persuasive akan mendorong pembaca untuk tertarik membaca modul ini. Di akhir, buku ini dilengkapi dengan soal-soal jawaban pendek, dan soal-soal jawaban benar dan salah yang akan memberikan evaluasi tentang pemahaman modul ini.

Terkahir, karena buku ini sifatnya adalah pengantar, beberapa bab tidak dijelaskan secara detail. Misalnya, bab tentang keuangan hanya digambarkan secara singkat. Karenanya penulis mohon kritik dan masukan untuk menyempurnakan penulisan ini.

Maret 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman sampul

Kata pengantar

Daftar Isi

Bab 1 Hal yang dipelajari dalam Ekonomi Makro1-1

Bab 2 Pengukuran Pendapatan Nasional2-1

Bab 3 Kerangka Belajar Ekonomi Makro3-1

Bab 4 Model Keseimbangan Pengeluaran Dua Sektor4-1

Bab 5 Model Keseimbangan dengan campur Tangan Pemerintah5-1

1.

Hal yang dipelajari dalam Ekonomi Makro

Mengapa Anda Perlu Tahu

Kita sering mendengar janji-janji kandidat calon kepala negara dan kepala daerah tentang hal-hal yang akan dilakukan jika terpilih menjadi presiden, gubernur atau bupati, diantaranya adalah mengurangi pengangguran (menciptakan lapangan pekerjaan), menjaga kesetabilan harga (mengurangi inflasi), meningkatkan kesejahteraan masyarakat (meningkatkan pertumbuhan ekonomi-pendapatan nasional).

Tahun 1997/1998 Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang sangat dahsyat yang sangat berpengaruh pada sendi-sendi perekonomian nasional, diantaranya banyak pemutusan hubungan kerja, tingginya inflasi, dan juga menurunnya daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang negatif.

Permasalahan-permasalahan di atas merupakan bahasan-bahasan utama dalam ekonomi makro. Ekonomi makro membahas kondisi-kondisi ini baik dari sisi teori maupun praktis (kebijakan). Secara praktis, bisa jadi model penyelesaian permasalahan krisis tersebut tidak semuanya menggunakan teori makro secara penuh, namun sedikit banyak menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut.

Ekonomi makro pendekatan teori sangat terkait erat dengan tingkat serapan tenaga kerja, produksi nasional (pendapatan nasional), inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pendekatan kebijakan sangat terkait bagaimana menurunkan pengangguran, mengurangi tingginya inflasi, dan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kita belajar ekonomi makro dari ukuran-ukuran statistik yang ada diantaranya pendapatan nasional, tingkat pengangguran, dan inflasi. Data-data tersebut secara umum tersedia di Badan Pusat Statistik.

Kendala utama belajar ekonomi makro adalah kompleksitas permasalahan ekonomi makro, dan terkadang sulit untuk mengilustrasikannya dalam kondisi perorangan. Contoh, bagaimana menerangkan cara menurunkan tingginya inflasi, bagaimana menerangkan cara menurunkan tingkat pengangguran, dan bagaimana menerangkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Karena tidak individu yang mengalaminya, melainkan secara general. Tidak seperti ekonomi mikro yang dapat dibayangkan oleh pelaku ekonomi, misalnya konsep produksi yang dapat dimisalkan bahwa seseorang adalah produsen, dan konsep konsumsi yang dapat dimisalkan bahwa seseorang adalah konsumen. Karenanya, untuk mempermudah pemahaman, bagian-bagian catatan ini ditulis dengan pendekatan yang sederhana. Contohnya bagaimana keseimbangan pasar tenaga kerja mencerminkan

upah, bagaimana pasar barang menentukan harga, dan bagaimana pasar uang menentukan tingkat suku bunga. Lebih dari itu, bagaimana ketiga pasar tersebut saling berinteraksi yang menyebabkan hubungan yang saling terkait dalam sebuah perekonomian, di mana pendapatan rumah tangga berasal dari perusahaan, atau dalam bentuk upah dan penerimaan dari modal yang dia tanamkan. Selanjutnya, pendapatan tersebut dibelanjakan lagi dalam bentuk pembelian barang atau tambahan investasi.

UKURAN-UKURAN EKONOMI MAKRO

Seperti sudah jamak diketahui bahwa tiga ukuran utama belajar ekonomi makro adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Secara holistik, ketiga ukuran tersebut dapat terjadi dalam satu waktu dan saling berkaitan. Misalnya, adanya krisis ekonomi dapat menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi dan hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang rendah atau terkadang minus dan menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran. Bab ini akan membahas kondisi-kondisi dasar perekonomian secara makro.

PERTUMBUHAN EKONOMI

Secara umum pertumbuhan ekonomi adalah gambaran perekonomian dari waktu ke waktu yang ditunjukkan dengan nilai produksi yang dihasilkan negara secara keseluruhan. Secara sederhana, nilai produksi disebut dengan Gross Domestik Bruto (GDP)¹ yang merupakan perkalian kuantitas barang dan harga barang yang diukur dalam satuan uang. Secara matematis formulasi pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi} = \frac{GDP_t - GDP_{t-1}}{GDP_{t-1}} \times 100$$

Di mana GDP_t adalah pendapatan nasional tahun tertentu, GDP_{t-1} adalah pendapatan nasional periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan persentase.

Terdapat permasalahan terkait perhitungan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan satuan uang. Di mana nilai uang berubah dari waktu ke waktu. Misalkan, harga buah apel tahun sekarang lebih tinggi dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Sehingga perhitungan

¹ Salah satu metode perhitungan GDP adalah metode output yang merupakan perkalian kuantitas barang dan harga barang akhir. Secara lengkap perhitungan GDP dibahas dalam bab Perhitungan Pendapatan Nasional.

nilai produksi tersebut bukan karena faktor meningkatnya jumlah output akan tetapi karena berubahnya harga.

Oleh karenanya, untuk menjaga bahwa perbandingan tersebut tetap benar, diperlukan justifikasi perhitungan yang dikenal dengan **GDP riel**. GDP tanpa memperhatikan faktor harga disebut dengan **GDP nominal**. GDP riel digunakan untuk menjustifikasi adanya pengaruh perubahan harga. Cara perhitungan GDP riel adalah dengan membagi GDP nominal dengan tingkat harga. Dengan kata lain, GDP nominal adalah nilai barang dan jasa yang dihitung pada harga tahun tertentu (tahun berjalan). Sedangkan GDP riel adalah nilai barang dan jasa yang dihitung pada harga tahun dasar (tingkat harga). Tingkat harga mengukur rata-rata harga barang dan jasa sebuah perekonomian.

Secara matematika dapat ditulis sebagai berikut.

$$\text{GDP riel} = \frac{\text{GDP nominal}}{\text{Tingkat harga}}$$

Dalam konteks Indonesia (berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik) GDP nominal disebut dengan **produk domestik bruto (PDB) atas harga dasar berlaku**, sedangkan GDP riel disebut dengan **PDB atas dasar harga konstan**. Tingkat harga didapatkan dari hasil survei yang dilakukan oleh BPS pada pelaku usaha yang memproduksi komoditas tertentu yang dikenal dengan survei harga produsen.

Berikut contoh sederhana untuk menghitung GDP riel.

Misalkan sebuah perekonomian terdiri dari tiga produk sepatu, baju dan beras. Tahun 2000 harga ketiga produk tersebut masing-masing adalah 200 ribu, 100 ribu dan 4 ribu. Secara detail dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1.1 Contoh Perhitungan GDP nominal Tahun 2000 dan Tahun 2015

Produk	2000			2015		
	Jumlah	Harga (ribu)	Nilai (ribu)	Jumlah	Harga (ribu)	Nilai (ribu)
Sepatu	20	200	4000	25	250	6250
Baju	30	100	3000	35	125	4375
Tas	30	4	120	30	10	300
Total			7.120			10.925

Contoh di atas merupakan contoh perhitungan GDP nominal. Selanjutnya cara untuk menghitung GDP riil adalah dengan mengalikan kuantitas pada tahun 2015 dengan harga pada tahun 2000. Perhitungan ini mengasumsikan bahwa tahun dasar perhitungan adalah tahun 2000. Perhitungan detail dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.2 Contoh Perhitungan GDP Riil Tahun 2015 berdasarkan Tahun Dasar 2000

Produk	2000			2015		
	Jumlah	Harga (ribu)	Nilai (ribu)	Jumlah	Harga (ribu)	Nilai (ribu)
Sapatu	20	200	4000	25	200	5000
Baju	30	100	3000	35	100	3500
Tas	30	4	120	30	4	120
Total			7.120			8.620

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa GDP riil tahun 2015 sebesar 8.620 atau terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 21%.

GDP Deflator

Dari formulasi di atas, sebenarnya dapat diketahui bahwa tingkat harga merupakan rasio antara GDP nominal dengan GDP riil. Jika memang demikian tingkat harga sama dengan **GDP deflator** yang merupakan hasil bagi GDP nominal dengan GDP riil dikalikan dengan 100.

Mengapa GDP deflator sama dengan tingkat harga? Bayangkan jika harga barang dan jasa meningkat sedangkan jumlah produksi tetap. Dalam hal ini pendapatan nominal akan meningkat akan tetapi pendapatan riil adalah tetap. Maka GDP deflator akan meningkat.

Kenyataannya baik harga dan produksi meningkat setiap tahun, akan tetapi peningkatan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan produksi, menyebabkan GDP nominal lebih tinggi dibandingkan dengan GDP riil dan semakin tinggi juga GDP deflator.

Cara lain untuk menghitung pendapat riil adalah dengan cara mengalikan jumlah barang X pada tahun ini dengan harga pada tahun dasar (tahun yang digunakan sebagai acuan perhitungan) ditambah dengan jumlah barang Y pada tahun ini dikalikan dengan harga barang lain pada tahun dasar, dan seterusnya.

Secara sederhana kita dapat memahami bahwa pendapatan seseorang tahun sekarang lebih tinggi dibandingkan dengan 20 tahun lalu. Misalkan pendapatan seseorang tahun 1995

adalah Rp 250.000 perbulan, sedangkan pendapatan seseorang tahun 2015 adalah Rp 3.000.000. Hal ini berarti selama 20 tahun terdapat peningkatan pendapatan seseorang sebesar Rp 2.750.000 atau meningkat sebesar 500%. Apakah logika ini benar?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu diketahui pendapatan riil masing-masing tahunnya. Misalkan GDP riil tahun 2015 sebesar Rp 2.800.000,-

Tabel 1.3 Contoh GDP Nominal dan GDP riil Tahun 1995 dan Tahun 2015.

	1995	2015
GDP nominal	Rp 250.000	Rp 3.000.000
GDP riil (Harga konstan 1995)	Rp 250.000	Rp 2.800.000

Dan dicari GDP deflatornya.

$$\text{GDP deflator} = \frac{\text{GDP nominal}}{\text{GDP riil}} \times 100$$

	1995	2015
GDP Deflator	Rp 250.000/ Rp 250.000 = 100	Rp 3.000.000/ Rp 2.800.000 = 107

Berdasarkan GDP deflator tersebut, kita dapat menghitung peningkatan tingkat harga

$$\begin{aligned} \text{Peningkatan tingkat harga} &= \frac{(107-100)}{100} \times 100 \\ &= 7\%. \end{aligned}$$

Artinya selama 20 tahun terjadi peningkatan pendapatan sebesar 7%.

GDP Perkapita

Jika kita simak, pendapatan seseorang dalam suatu negara disebut dengan **pendapatan perkapita**. Dalam istilah ekonomi disebut gross domestic bruto (GDP). Bagaimana pendapatan perkapita tersebut dihitung? faktor-faktor apa yang menyebabkan meningkatnya pendapatan perkapitan tersebut? secara sederhana didefinisikan bahwa pendapatan perkapita diturunkan dari total pendapatan negara dibandingkan dengan jumlah penduduk. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan **total pendapatan negara**?

Sebelum membahas itu perlu diketahui bahwa pengukuran pendapatan perkapita tersebut dihitung berdasarkan hitungan uang, yang nilainya berbeda antar waktu. Maksudnya, nilai uang Rp 250.000 pada tahun 1996 bisa jadi sama dengan 500 nasi bungkus sedangkan nilai uang Rp 3.000.000 sama dengan 500 nasi bungkus. GDP perkapita dihitung berdasarkan harga konstan. Misalkan Pendapatan riil negara sebesar 3 milyar sedangkan jumlah penduduk sebesar 200 ribu, maka GDP perkapita sebesar Rp 15 ribu.

GDP potensial

Pada prinsipnya GDP mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Namun, terkadang perekonomian dapat memproduksi di atas kapasitasnya, atau yang disebut dengan GDP potensial. Ini dapat terjadi jika faktor produksi (tenaga kerja, mesin, dll) dapat memproduksi pada kondisi lebih dari rata-ratanya). Maksudnya, tenaga kerja dapat dioperasikan berdasarkan kapasitasnya.

Dalam ilmu ekonomi, peningkatan pendapatan yang mencolok disebut *boom*, sedangkan penurunannya disebut *recession*, resesi. Penurunan yang sangat dalam disebut **depresi**. Indonesia pernah mengalami depresi pada tahun 1997/1998.

Pada saat perekonomian mengalami resesi, perekonomian beroperasi di bawah GDP potensialnya. Pada saat itu, pengangguran sangat tinggi dan mesin-mesin tidak digunakan berdasarkan kapasitasnya.

TINGKAT PENGANGGURAN

Tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pendapatan nasional, dan dalam jangka panjang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, perekonomian tidak selamanya berjalan linear, artinya pertumbuhan ekonomi tidak selamanya meningkat. Ada kalanya perekonomian mengalami guncangan (*economy shocking*) yang diakibatkan oleh variabel-variabel di dalamnya. Pada saat perekonomian mengalami penurunan, pada saat itu pengangguran muncul. Pengangguran merupakan penggunaan sumberdaya yang tidak sempurna. Tenaga kerja, yang seharusnya bekerja, menjadi tidak bekerja. Jika seseorang tidak bekerja dalam waktu yang relatif lama, maka yang bersangkutan akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Dalam pandangan yang lebih luas, jika seseorang menganggur, maka seseorang tersebut akan menjadi beban orang lain (keluarga atau yang menanggung kebutuhan hidupnya). Akibatnya, muncullah tingkat kemiskinan dalam keluarga, karena standar hidup yang bersangkutan lebih rendah dibandingkan standar kemiskinan. Dan dalam skala negara,

maka pengangguran merupakan beban yang harus ditanggung oleh negara. Oleh karenanya, pengangguran merupakan permasalahan dalam perekonomian makro.

Definisi Pengangguran

Perdefinisi, pengangguran adalah banyaknya orang yang mencari pekerjaan pada saat usia kerja. Seseorang dikatakan menganggur ketika orang pada usia kerja (18-55) yang sedang mencari pekerjaan dan tidak dapat menemukannya. Dengan kata lain, seseorang yang pada usia kerja akan tetapi pada saat tersebut (saat dilakukan survey) tidak mencari kerja dikatakan tidak menganggur. Misalkan saja, orang yang sedang cuti dalam waktu tertentu. Kondisi menyebabkan tingkat pengangguran cenderung tidak tetap (bergerak) dari waktu ke waktu.

Secara umum, ahli ekonomi mengkategorikan pengangguran menjadi tiga, yaitu **pengangguran friksional, structural dan pengangguran siklis**. Seseorang dikatakan menganggur secara friksi jika (1) dia keluar dari pekerjaan yang sekarang dan belum mencari yang baru, (2) belum bekerja pada saat usianya masuk angkatan kerja. Selanjutnya pengangguran structural adalah pengangguran yang disebabkan karena pengurangan tenaga kerja oleh perusahaan/tempat bekerja secara permanen (tidak pasti kapan akan bekerja lagi). Biasanya, individu yang mengalami pengangguran structural memiliki waktu tunggu lebih lama dibandingkan dengan pengangguran friksional. Pengangguran siklis adalah pengangguran yang terjadi karena perekonomian mengalami masa sulit. Ketiga jenis pengangguran ini dapat secara bersama-sama atau terpisah. Misalnya orang yang masuk usia kerja pada ekonomi sulit, maka penganggurannya berupa penganggura friksional dan juga siklis.

Pengkategorian jenis pengangguran ini akan bermanfaat dalam menjelaskan perekonomian. Misalnya ekonomi beroperasi pada tenaga kerja penuh, artinya tidak ada pengangguran dalam perekonomian tersebut (meskipun dalam kenyataannya terdapat pengangguran sebesar 3-7%). Hal ini terjadi karena adanya pengangguran structural dan friksional. Sedangkan jika terdapat pengangguran siklis, maka perekonomian dalam kondisi resesi (yang merupakan bahasan utama ekonomi makro).

Biasanya, pengangguran dihitung dengan persentase. Sehingga pengangguran merupakan rasio orang yang tidak bekerja dengan angkatan kerja. Atau secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Tingkat pengangguran} = \frac{\text{Jumlah orang yang menganggur}}{\text{angkatan kerja}}$$

Ekonomi belajar bagaimana bagaimana hubungan antara kinerja perekonomian dengan tingkat pengangguran. Pada tahun 1998 saat terjadi krisis ekonomi, tingkat pengangguran mengalami peningkatan. Hal ini logis karena perusahaan tidak dapat mengoperasikan faktor produksinya secara optimal, karenanya muncullah pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan pengangguran.

Tabel 1.4 Pengangguran terbuka di Perkotaan dan Perdesaan tahun 1976-2000.

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
1976-1979	6,4	1,7	2,5
1986-1989	7,1	7,1	2,7
1990-1993	5,7	1,5	2,7
1994-1997	8,2	2,9	4,6
1998-2000	9,7	3,7	6,0

Sumber: Dhanani, 2004 diambil dari data Sakernas, BPS.

Dhanani S., 2004, *Unemployment and Underemployment in Indonesia, 1976-2000: Paradox and Issue*, International Labor Organization 2004.

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tahun 1998-2000 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa adanya krisis menyebabkan perusahaan tidak dapat mengoperasikan sumberdaya manusia secara optimal dan akibatnya terjadi pemutusan hubungan tenaga kerja.

INFLASI

Tahun 1995 satu liter bensin seharga Rp 700, dua puluh tahun setelah itu, 2015, harga bensin per liter seharga Rp 7.400. Dilihat secara nominal, selama 20 tahun terjadi peningkatan harga sebesar Rp 6.700. Namun demikian, kenaikan harga bensin saja bukan merupakan inflasi. Karena bensin hanya merupakan salah satu produk dalam perekonomian Indonesia. Sedangkan inflasi merupakan kenaikan harga barang secara umum (keseluruhan).

Dalam contoh di atas, jika kenaikan bensin selama dua puluh tahun sebesar Rp 6.700 (naik > 900%) diikuti dengan kenaikan harga barang lain dengan persentase yang sama, maka perhitungan tingkat inflasi menjadi mudah. Namun, dalam kenyataan kenaikan bensin dan kenaikan harga barang lain tidaklah sama. Misalkan kenaikan harga beras sebesar 500%, kenaikan harga pupuk sebesar 300% dan sebagainya. Oleh karenanya perlu ada satu ukuran standar untuk menghitungnya. Ukuran tersebut dapat didekati dengan kemampuan untuk

membayar pelaku pasar atau dikenal dengan istilah **tingkat harga (price level)**. Misalkan, harga barang tahun 1995 sebesar Rp 150.000 dan harga barang tahun 2005 sebesar Rp 200.000, maka kita bilang tingkat harga tahun 1995 adalah 100 dan tingkat harga barang mengalami kenaikan sebesar 33.33% atau tingkat harga menjadi 133.

Tingkat harga dikenal dengan istilah indeks harga. Indeks harga pada tahun dasar perhitungan adalah sebesar 100. Untuk mengetahui indeks harga tahun yang lain dilakukan dengan membagi tingkat harga pada tahun tersebut dengan harga pada tingkat harga pada tahun dasar dikalikan dengan 100. Sehingga **indeks harga (price index)** merupakan rasio tingkat harga pada tahun tertentu dengan tingkat harga pada tahun dasar.

Indek Harga Konsumen (IHK)

Untuk mengetahui indeks harga barang, Badan Pusat Statistik telah melakukan sebuah survei yang dikenal dengan istilah survei harga konsumen. Survei ini dilakukan terhadap penyedia barang akhir yang dikonsumsi oleh konsumen yaitu perdagangan eceran, rumah tangga (untuk mengetahui upah pembantu), dokter dan sebagainya. Survei ini dilakukan di berbagai kota besar di Indonesia. Survei dilakukan di 82 kota besar di Indonesia (termasuk 33 propinsi). Survei tersebut meliputi 225-462 barang dan jasa yang ada di Indonesia yang dikelompokkan menjadi tujuh kelompok barang yaitu tujuh kelompok pengeluaran yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; serta transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Jumlah sampel yang dikumpulkan sebanyak 3-4 sampel pada masing-masing kelompok barang.

Indeks harga konsumen merupakan ukuran untuk mengetahui rata-rata harga barang secara umum pada periode tertentu. Secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{Indeks harga konsumen} = \frac{\text{Pengeluaran tahun tertentu}}{\text{pengeluaran tahun dasar}} \times 100$$

Satuan indeks harga konsumen bukanlah rupiah atau satuan lain, melainkan perubahan harga dari waktu ke waktu. Kita tidak bisa menggunakan IHK untuk mengukur tingkat harga yang dirasakan, hanya bisa mengukur berapa perubahan harga dari waktu ke waktu.

Menggunakan Indeks Harga untuk menghitung Inflasi

Setelah kita mendapatkan indeks harga konsumen yang didapatkan dari data BPS kita punya kesempatan untuk menghitung inflasi. Inflasi dihitung dengan rasio antara indeks selesai indeks harga konsumen dua periode dengan indeks harga konsumen periode sebelumnya. Di Indonesia survei harga konsumen dilakukan setiap bulan. Berikut data indeks harga konsumen yang dikeluarkan BPS dari tahun 2005-2014.

Tabel 1.5 Indeks Harga Konsumen dan Inflasi 2013.

Bulan	IHK	Inflasi
Januari	136.88	1.10
Februari	137.91	0.75
Maret	138.78	0.63
April	138.64	-0.10
Mei	138.6	-0.03
Juni	140.03	1.03
Juli	144.63	3.29
Agustus	146.25	1.12
September	145.74	-0.35
Oktober	145.87	0.09
November	146.04	0.12
Desember	146.84	0.55
Total		8.20

Sumber : BPS, 2015

IHK Desember 2012 sebesar 135.39

Menghitung Nilai Uang dengan Indeks Harga Konsumen dari Periode ke Periode

Misalkan Anda bekerja dan mendapatkan gaji. Selanjutnya gaji Anda sebesar Rp 3 juta. Nominal gaji itu jelas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gaji orang tua anda pada dua puluh tahun yang lalu yang hanya 500 ribu. Jelas, harga barang dua puluh tahun yang lalu lebih rendah dibandingkan sekarang. Namun, bagaimanakah nilai uang (gaji) sekarang dibandingkan dengan dua puluh tahun yang lalu? Apakah pendapatan anda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan dua puluh tahun lalu?

Kita dapat menghitung nilai uang tersebut dan membandingkannya dengan nilai sekarang dengan indeks harga konsumen tersebut. Formulasi yang digunakan adalah.

$$\text{Nilai uang (gaji) sekarang} = \frac{\text{IHK tahun 2014}}{\text{IHK tahun 1995}} \times \text{Nominal uang tahun 1995}$$

Indeks Harga Produsen

Kita sudah mengenal GDP deflator, indeks harga konsumen (IHK) untuk mengukur adanya perubahan harga dari periode ke periode lain dengan pendekatan harga konsumen. Terdapat metode lain untuk mengukur efek harga dari waktu ke waktu yaitu indeks harga produsen. Metode ini memiliki prinsip yang sama dengan indeks harga konsumen, namun dengan pendekatan harga pada tingkat perusahaan (produsen).

Indeks harga konsumen ini ditentukan berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS ke sejumlah produsen. Indeks harga produsen dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai suatu produk dari periode ke periode akan tetapi dari sisi produsen.

Istilah-istilah Penting

Inflasi	Indeks harga produsen
Indeks harga konsumen	GDP deflator
GDP riil	GDP nominal
GDP potensial	GDP perkapita
Tingkat pengangguran	Resesi
Boom	Deflasi
Pengangguran structural	Pengangguran siklis
Pengangguran friksional	

Pertanyaan Jawaban Pendek

1. Tiga permasalahan utama yang dibahas dalam ekonomi makro adalah.....
2. Pengukuran output (GDP) yang diukur dengan memasukkan harga berlaku disebut dengan
3. GDP yang diukur dengan mengeluarkan factor harga (diukur dengan harga konstan) disebut dengan

4. Rasio antara harga pada tahun tertentu dengan harga yang telah ditentukan (tahun dasar) dikalikan dengan 100 disebut dengan.....
5. Indeks harga konsumen disebut juga dengan.....yaitu rasio antaradan
6. Apakah hubungan GDP riil dengan lapangan pekerjaan?..
7. Apakah hubungan pertumbuhan GDP riil dengan tingkat pengangguran?
8. Kondisi perekonomian (otput) dimana faktor produksi bekerja sesuai dengan kapasitasnya disebut dengan.....

Pertanyaan Jawaban Benar atau Salah

1. Permasalahan utama ekonomi makro adalah masalah rendahnya pendapatan nasional.
2. Jika GDP nominal adalah Rp 1000 dan GDP riil adalah Rp 900, maka GDP deflator adalah Rp 111.
3. Jika GDP riil sama dengan GDP potensial, maka perekonomian berada dalam kondisi tenaga kerja penuh atau tidak ada pengangguran.
4. GDP perkapita adalah GDP yang diterima masing-masing warga negara.
5. Kenaikan harga barang tertentu saja disebut dengan inflasi.
6. Pertumbuhan ekonomi merupakan rasio antara selisih GDP periode tertentu dengan periode sebelumnya dibagi dengan GDP periode sebelumnya dikalikan 100.

---000---

2.

Pengukuran Pendapatan Nasional

Mengapa Anda Perlu Tahu

Pendapatan nasional merupakan indikator besarnya kecilnya perekonomian suatu negara. Sebuah negara dikatakan menguasai perekonomian dunia jika pendapatan nasionalnya dominan di dunia. Kondisi baru-baru ini (2014) China merupakan perekonomian terbesar kedua di dunia setelah Amerika. Hal ini karena pendapatan nasionalnya terbesar kedua. Salah satu faktor penting besarnya pendapatan nasional China adalah karena besarnya jumlah penduduk yang mencapai 1,5 milyar penduduk. Indonesia merupakan negara dengan pendapatan nasional terbesar ke 17 di dunia. Hal ini bisa jadi karena karena total penduduknya besar sehingga pendapatan nasionalnya juga besar.

Bagaimana mengukur pendapatan nasional tersebut?. Apakah jika jumlah penduduknya besar akan secara otomatis pendapatan nasionalnya besar?. Terdapat tiga pendekatan dalam perhitungan pendapatan nasional, yaitu: (1) pendekatan pengeluaran, (2) pendekatan pendapatan, dan (3) pendekatan nilai tambah. Metode ini diperkenalkan oleh ahli ekonomi tahun 1930-an yang dipelopori oleh Wisley Leontief.

Pendekatan Pengeluaran

Untuk menghindari perhitungan ganda tersebut, salah satu cara adalah dengan menelusuri kemana barang tersebut digunakan. Terdapat empat kategori besar ke mana barang tersebut digunakan. *Pertama*, barang tersebut dikonsumsi oleh konsumen akhir (disebut dengan istilah **konsumsi**), kedua, barang tersebut digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi barang lain (dikenal dengan istilah **investasi**, tanpa memperhatikan di mana barang tersebut diproduksi). Beberapa barang ada yang dikonsumsi oleh pemerintah (disebut dengan pengeluaran **pemerintah**). Dan terakhir adalah barang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan **ekspor** . Namun karena di sisi lain, juga ada barang yang sama yang didatangkan dari luar negeri untuk dikonsumsi dalam negeri, maka ekspor tersebut perlu dikurangi dengan impor. Nilai ekspor dikurangi impor tersebut disebut dengan istilah ekspor bersih (**net export**).

Secara matematis GDP pendekatan output dinyatakan dengan:

$$GDP = C + I + G + (X - M)$$

Di mana C = konsumsi rumah tangga, I = investasi, G = pengeluaran pemerintah, X = ekspor, dan M = impor.

pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa GDP merupakan penjumlahan konsumsi konsumen akhir (C), investasi yang dikeluarkan swasta (I), belanja pemerintah (G) dan ekspor bersih (E).

Pendekatan Pendapatan

Metode ketiga pendekatan pendapatan nasional adalah pendekatan pendapatan. Pendapatan berarti nilai yang diperoleh oleh pemilik faktor produksi. Pemilik faktor produksi tenaga kerja akan mendapatkan upah dari curahan waktu yang dikeluarkan. Selanjutnya, pemilik faktor produksi modal akan mendapatkan nilai dari modal yang diinvestasikan. Pemilik usaha akan mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukan.

Secara matematis GDP pendekatan pendapatan dituliskan sebagai:

$$GDP = w + i + t + p$$

Di mana w adalah upah yang diterima oleh pekerja, i adalah bunga yang dibayarkan ke pemilik modal, t adalah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan ke pemerintah dan p adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Berikut ini contoh GDP Indonesia tahun 2005 berdasarkan dua pendekatan.

Pendekatan Pengeluaran	Rupiah (juta)	Pendekatan Pendapatan	Rupiah (juta)
Konsumsi	1,785,591	Upah dan gaji	882,217
Investasi	729,346	Keuntungan	1,656,641
Pengeluaran pemerintah	224,980	Penyusutan	291,794
Ekspor bersih	136,973	Pajak tidak langsung	112,164
		Subsidi	-65,926
Jumlah	2,876,890	Jumlah	2,876,890

Sumber: Tabel Input-Output Indonesia, 2005.

PDB pendekatan pengeluaran sama dengan PDB pendapatan.

Berdasarkan dua perhitungan tersebut dipahami bahwa perhitungan GDP dengan pendekatan pengeluaran sama dengan perhitungan GDP pendekatan pendapatan.

Pendekatan Nilai Tambah

Cara lain untuk menghitung GDP adalah pendekatan nilai tambah. Pendekatan ini menekankan pada nilai yang didapatkan oleh masing-masing pelaku usaha. Contoh sederhana adalah pakaian yang dijual dengan harga akhir sebesar 250 ribu. Harga ini adalah harga akhir yang melibatkan berbagai produk pelaku usaha diantara adalah petani kapas, pabrik tenun, pabrik pakaian, dan butik tertentu penjual pakaian tersebut. Tentunya pendekatan ini lebih menekankan pada produk yang sejenis dan lebih mengasumsikan bahwa produk tersebut bersifat homogen. Misalkan nilai kapas ditingkat petani adalah 50 ribu, petani menjual ke pabrik tenun seharga Rp 100 ribu, kemudian perusahaan tenun menjual ke pabrik baju dengan harga Rp 150 ribu, dan butik menjualnya dengan harga Rp 200 ribu. Karenanya, perhitungan GDP dengan pendekatan nilai tambah dapat dilakukan dengan mencari nilai tambah produk tersebut. Untuk memudahkan lihat tabel berikut.

Tabel Perhitungan nilai tambah produk baju

Pelaku Usaha	Nilai produk (Rp ribu)	Pelaku usaha	Nilai tambah (Rp ribu)
Petani	25	petani	25
Perusahaan Tenun	75	Perusahaan tenun	50
Perusahaan baju	135	perusahaan baju	60
Penjual baju (butik)	200	Penjual baju (butik)	65

Pendekatan Output (Produk Akhir)

Perekonomian negara merupakan penilaian barang yang dikonsumsi dan diproduksi oleh pelaku ekonomi secara keseluruhan. Jika perekonomian sebuah negara hanya terdiri dari dua sektor saja, sebut saja sektor perumahan dan sektor pakaian, maka perhitungan pendapatan nasional terasa mudah, yaitu dengan cara menambahkan hasil perkalian antara jumlah harga rumah dengan banyaknya rumah dan jumlah pakaian dan banyaknya pakian. Namun karena banyaknya jumlah sektor dalam perekonomian, maka perhitungan pendapatan nasional menjadi lebih kompleks. Terlebih, rumah terdiri dari bahan baku, seperti semen, besi, dan material lain yang juga merupakan produk akhir dalam pasar. Selanjutnya, bagaimana perhitungan pendapatan nasional tersebut?.

Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan output merupakan penambahan jumlah uang (rupiah) barang dan jasa yang diproduksi dikategorikan menurut penggunaan terakhir. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana membedakan barang akhir (*final goods*) dan barang setengah jadi (*intermediate goods*). Harga rumah, Rp 200 juta, misalnya, termasuk di dalamnya jumlah semen dan harga semen, Rp 50 ribu kali 100 buah, atau Rp 5 juta. Juga, termasuk pengeluaran kayu pasir sebagainya. Sehingga perhitungan pendapatan

nasional berdasarkan perhitungan barang akhir akan menyebabkan perhitungan ganda (*double counting*). Dalam contoh di atas, jika pendapatan nasional didasarkan pada perhitungan nilai barang akhir, di mana nilai rumah Rp 200 juta dan nilai semen dalam rumah tersebut Rp 5 juta, maka akan terjadi perhitungan ganda. Berpijak pada adanya perhitungan ganda tersebut, maka pendekatan output menghitung GDP berdasarkan pada produk akhir.

Mengukur Standar Hidup

GDP yang disebutkan di atas adalah berdasarkan ukuran-ukuran ekonomi. Terdapat ukuran-ukuran lain yang digunakan untuk mengukur standar hidup, diantaranya adalah tingkat melek huruf, tingkat kematian bayi, dan tingkat harapan hidup manusia. Terlebih dari itu, ada ukuran lain (biasanya digunakan oleh ahli sosial) untuk mengukur kesejahteraan yaitu tingkat kebahagiaan.

Pengukuran Perekonomian (Output) yang lain

Kita sudah membahas bahwa perekonomian diukur dengan GDP. Namun demikian ada pengukuran lain yang juga digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara, yaitu Pendapatan nasional (*National Income-NI*), Produk Nasional Bersih (*Net National Product-NNP*), Produk Nasional Kotor (*Gross National Product-GNP*), dan Pendapatan personal siap pakai (*Personal Disposable Income, Yd*). Ukuran-ukuran tersebut saling terkait antar satu dengan yang lain. Berikut diterangkan masing-masing pengukuran tersebut.

Pendapatan Nasional (*National Income-NI*)

Pendapatan nasional merupakan penambahan balas jasa faktor produksi dalam memproduksi barang dan jasa. Balas jasa tersebut meliputi upah, tingkat suku bunga, biaya sewa dan keuntungan yang diterima pelaku usaha.

Produk Nasional Bersih (*Net National Product-NNI*)

Produk nasional bersih merupakan penambahan pendapatan nasional dan pajak tidak langsung.

Produk Nasional Kotor (*Gross National Product-GNP*),

Produk Nasional Kotor adalah penambahan produk nasional bersih dengan depresiasi atau penyusutan. Nilai penyusutan ini dikenal dengan istilah *consumption capital allowance* (modal yang telah dikonsumsi).

Gross Domestic Product (Output)

Merupakan keseluruhan nilai faktor produksi yang ada di dalam negeri. Nilai ini sudah mengeluarkan nilai faktor produksi asing yang ada dalam negeri dan juga sudah memasukkan faktor domestik yang ada di luar negeri. Dengan kata lain GDP merupakan penambahan dari upah, tingkat suku bunga, biaya sewa dan keuntungan yang diterima pelaku usaha, pajak yang dibayarkan, penyusutan usaha.

Untuk mempermudah pemahaman digunakan ilustrasi berikut.

Faktor Produksi		Rupiah (juta)
Upah dan gaji	(a)	882,217
Sewa	(b)	120,000
Bunga modal	(c)	450,000
Keuntungan	(d)	1,086,641
Pendapatan Nasional	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)	2,538,858
Pajak tidak langsung	(f)	112,164
Produk Nasional Bersih	(g)=(e)+(f)	2,651,022
Penyusutan	(h)	291,794
Produk Nasional Kotor	(i)=(g)+(h)	2,942,816
Faktor asing-domestik	(j)	50,000
Faktor domestik-asing	(k)	50,000
Subsidi	(l)	65,926
Produk Domestik Bruto	(m)=(i)-(j)+(k)-(l)	2,876,890

Sumber :Tabel I-0 2005 dengan modifikasi

Pendapatan personal siap pakai (*Personal Disposable Income, Yd*)

Pendapatan personal siap pakai adalah jumlah pendapatan nasional yang diterima oleh individu. Atau dengan kata lain *disposable income* adalah pendapatan yang siap dipakai oleh individu. Y_d adalah pendapatan individu (*personal income*) dikurangi dengan pajak individu. Sedangkan pendapatan individu adalah pendapatan nasional (NI) dikurangi keuntungan perusahaan ditambah dengan transfer yang dilakukan pemerintah dan perusahaan ke individu. Berikut ilustrasi pendapatan personal siap pakai (Y_d).

Pendapatan Nasional	(a)	2,538,858
Keuntungan perusahaan	(b)	1,086,641
transfer perusahaan ke individu	(c)	50000
transfer pemerintah ke individu	(d)	65926
Pendapatan individu	(e)=(a)-(b)+(c)+(d)	1,568,143
Pajak individu	(f)	253885.8
Pendapatan inividu siap pakai (Y_d)	(g)=(e)-(f)	1,314,257

Pendapatan individu siap pakai (Y_d) merupakan variabel penting dalam ekonomi makro. Variabel ini akan dibahas secara kontinyu pada bab-bab mendatang.

Bagaimana Upaya Meningkatkan Pendapatan Nasional

Jika kita hanya melihat kondisi perekonomian secara formulasi matematis seperti di atas baik pendekatan pengeluaran maupun pendapatan, maka untuk meningkatkan pendapatan nasional hal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan variabel-variabel yang ada di sebelah kanan. Misalnya dengan pendekatan pendapatan variabel yang dapat meningkatkan pendapatan nasional adalah upah. Selanjutnya, peningkatan upah dapat ditempuh dengan menambah tenaga kerja dan seterusnya.

Namun demikian, permasalahan ekonomi makro tidak sesederhan itu, karena (dalam kasus penyederhanaan di atas) bagaimana cara untuk menambah tenaga kerja?. Hal ini akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya.

Istilah-Istilah Penting

Pendapatan Nasional

Pendekatan output

Pendekatan pengeluaran

Pendekatan Pendapatan

Pendekatan nilai tambah

Pendapatan individu siap pakai (*disposable income*)

Produk Nasional Kotor (*Gross National Product*)

Soal-soal Jawaban Pendek

1. Tiga pendekatan penghitungan gross domestic product (GDP) adalah
2. Menurut pendekatan pengeluaran, GDP adalah penjumlahan dari
3. Menurut pendekatan pendapatan pemilik faktor produksi, GDP adalah
4. Terdapat pengukuran lain dalam perekonomian antara lain.....
5. Dari pengukuran-pengukuran yang ada, kenapa pengukuran GDP lebih sering (umum) digunakan dibandingkan dengan pengukuran yang lain.
6. Pendapatan individu yang siap dipakai disebut dengan
7. GDP dengan yang masih meliputi subsidi di dalamnya, dan masih menghitung faktor asing dari pasar domestik dan belum memasukkan faktor domestik dari asing disebut dengan.....

Pertanyaan Jawaban Benar Salah

1. Metode pendapatan merupakan satu-satunya cara pengukuran pendapatan nasional
2. Jika konsumsi sebesar Rp 5000, investasi sebesar Rp 1000, pengeluaran pemerintah sebesar Rp 2000, ekspor bersih sebesar Rp 1500, dan upah sebesar Rp 2000; maka pendapatan nasional sebesar Rp 9500.
3. Perhitungan perekonomian dengan pendekatan pendapatan meliputi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan net ekspor.
4. Pendekatan yang menekankan pada nilai yang didapatkan oleh masing-masing pelaku usaha disebut dengan pendekatan nilai tambah.
5. Pendapatan nasional yang siap dikonsumsi oleh individu disebut dengan pendapatan bersih.

3.

Kerangka Belajar Ekonomi Makro

Pandangan Klasik, Keynes dan Sesudahnya

Mengapa Anda Perlu Tahu

Tahun 1997 Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh krisis moneter di Asia. Secara makro, krisis ekonomi (yang menyebabkan nilai tukar mata uang Indonesia mengalami penurunan) menyebabkan harga barang-barang mengalami kenaikan (inflasi). Akibatnya sektor usaha tidak mampu memproduksi sesuai kapasitasnya. Maka, terjadilah penurunan GDP. Pertanyaannya adalah bagaimana ahli-ahli ekonomi menjelaskan kondisi ini?

Bab ini menjelaskan pandangan ahli tentang perekonomian makro. Pandangan ahli-ahli tersebut dipisahkan menjadi tiga yaitu pandangan klasik, pandangan Keynes dan pandangan setelah Keynes (Post Keynes). Pandangan klasik berpendapat bahwa kondisi pasar (hubungan antara output total dan harga) dapat seimbang dengan sendirinya. Artinya, peran pemerintah perlu diminimalisir. Golongan ini dipelopori oleh Adam Smith dan David Ricardo pada abad 18. Selanjutnya pada tahun 1930an perekonomian Eropa khususnya Inggris terguncang krisis yang menyebabkan pengangguran besar-besaran (diperkirakan sampai setengah angkatan kerja mengalami pengurangan).

Menurut teori Klasik pengangguran tersebut dapat kembali dengan sendirinya. Artinya orang yang menganggur akan mendapat pekerjaannya kembali. Namun hal ini membutuhkan waktu, sampai seorang ekonom English bernama John Maryland Keynes (dikenal dengan Keynes saja) mengemukakan tentang pentingnya peran pemerintah untuk memulihkan perekonomian. Pemerintah memiliki peran menstabilkan perekonomian dengan instrumen yang dimilikinya dengan mempengaruhi pengeluaran agregat (sisi permintaan). Golongan Keynes lebih menitikberatkan perekonomian dari sisi permintaan (konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor) dan sedikit perhatian pada sisi penawaran. Padahal pada saat terjadi krisispun, swasta (pelaku usaha juga beraksi) untuk menjaga usahanya tetap stabil. Selain itu ide Keynes lebih pada mengatasi kondisi pergeseran pasar dari kondisi keseimbangan dalam jangka pendek, bukan dalam jangka panjang (pertumbuhan ekonomi).

Sehingga, setelah Keynes (tahun 1970an), banyak ahli-ahli ekonomi yang cenderung kembali berpihak pada golongan ekonomi klasik, tentunya dengan model-model baru (dikenal dengan era modern). Karenanya di era tahun 2000an banyak buku yang membahas

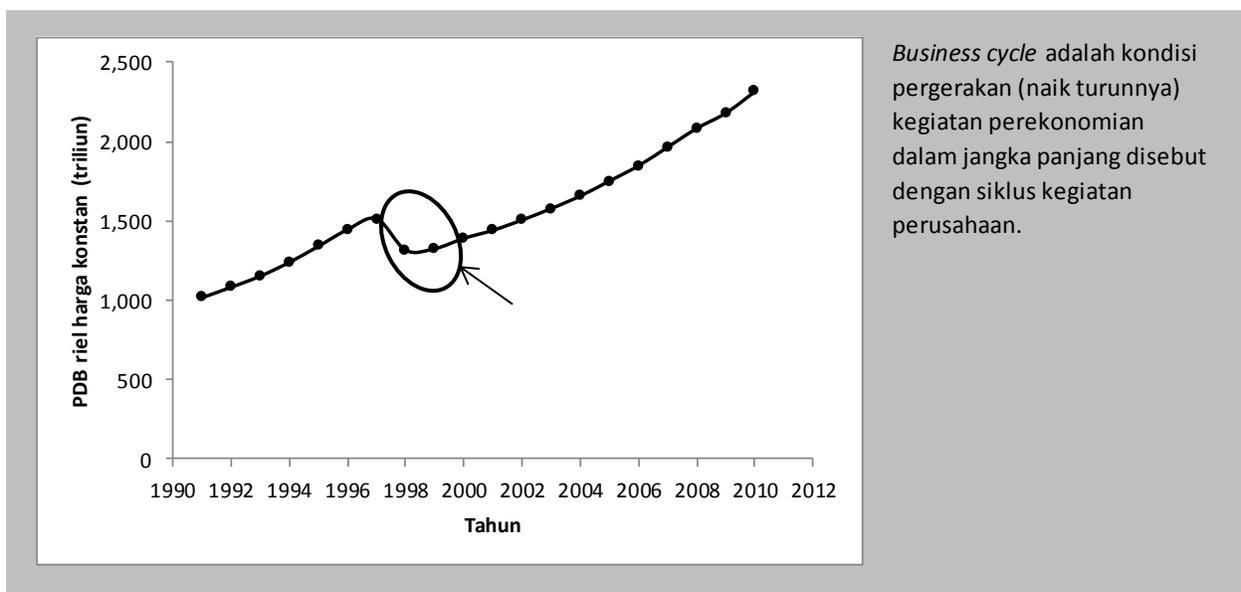
perekonomian dari sudut pandang modern, meskipun tidak sedikit yang berpihak pada golongan Keynes dengan model-model yang lebih baru.

Perlu diungkapkan bahwa antara satu ahli dengan ahli lainnya bersifat saling melengkapi. Mazhab Keynes tidak akan lahir jika tidak ada mazhab klasik. Begitu juga mazhab Keynes juga tidak hadir jika mazhab-mazhab sebelumnya tidak ada.

Resesi Ekonomi Tahun 1997 dan siklus bisnis (*business cycles*)

Pada awal sub bab telah dijelaskan bahwa perekonomian Indonesia pernah terguncang akibat krisis ekonomi tahun 1997. Pada saat tersebut GDP Indonesia mengalami penurunan dari 1.512 triliun tahun 1997 menjadi 1.314 triliun tahun 1998 (lihat gambar 3.1) atau terjadi penurunan sebesar 13%. Perkembangan GDP berdasarkan harga konstan dari tahun 1991-2010 dapat dilihat dalam grafik berikut.

Gambar 3.1 Pergerakan PDB Indonesia tahun 1991-2010



Sumber: Badan Pusat Statistik, 1992-2011.

Kondisi perekonomian tahun tersebut merupakan salah satu titik dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Kondisi pergerakan (naik turunnya) kegiatan perekonomian dalam jangka panjang disebut dengan siklus kegiatan perusahaan (*business cycle*). Kasus tersebut merupakan kasus realistik (mudah dipahami) dalam pembahasan ekonomi makro, terutama dalam jangka pendek. Karena dalam kondisi tersebut terjadi gejolak ekonomi yang memunculkan pengangguran (perekonomian dalam kondisi tidak seimbang). Selanjutnya, pertanyaan menarik adalah apa yang dimaksud dengan kondisi perekonomian yang seimbang?

Keseimbangan Menurut Ekonomi Mikro

Menurut ekonomi mikro, secara luas disepakati bahwa keseimbangan terjadi (bertemu) jika penawaran sama dengan permintaan. Secara mikro kita sepakat bahwa penawaran adalah hubungan antara barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Secara grafis penawaran dapat digambarkan dalam sebuah kurva penawaran di mana jumlah barang yang ditawarkan terletak pada sumbu X dan harga pada sumbu Y. Begitu juga permintaan adalah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Secara grafis dapat digambarkan hubungan antara barang yang diminta pada sumbu X dan harga pada sumbu Y. Selanjutnya, apa yang dimaksud penawaran dan permintaan dalam keseimbangan umum (ekonomi makro)?

Mendasarkan definisi tersebut, keseimbangan tercapai jika kurva penawaran dan permintaan bertemu pada titik tertentu dimana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga keseimbangan. Keseimbangan ini adalah untuk pasar barang tertentu, misalnya keseimbangan pasar beras, keseimbangan pasar mie instan, dan lainnya.

Analisis Keseimbangan Ekonomi Makro (Keseimbangan umum)

Bagaimana konsep keseimbangan umum pada ekonomi makro? Ingat kembali konsep ekonomi makro yang membahas pasar secara keseluruhan. Dalam perekonomian terdapat pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja. Selain itu, terdapat juga peran pemerintah dan perdagangan asing (ekspor-impor) yang semuanya dapat mempengaruhi keseimbangan umum.

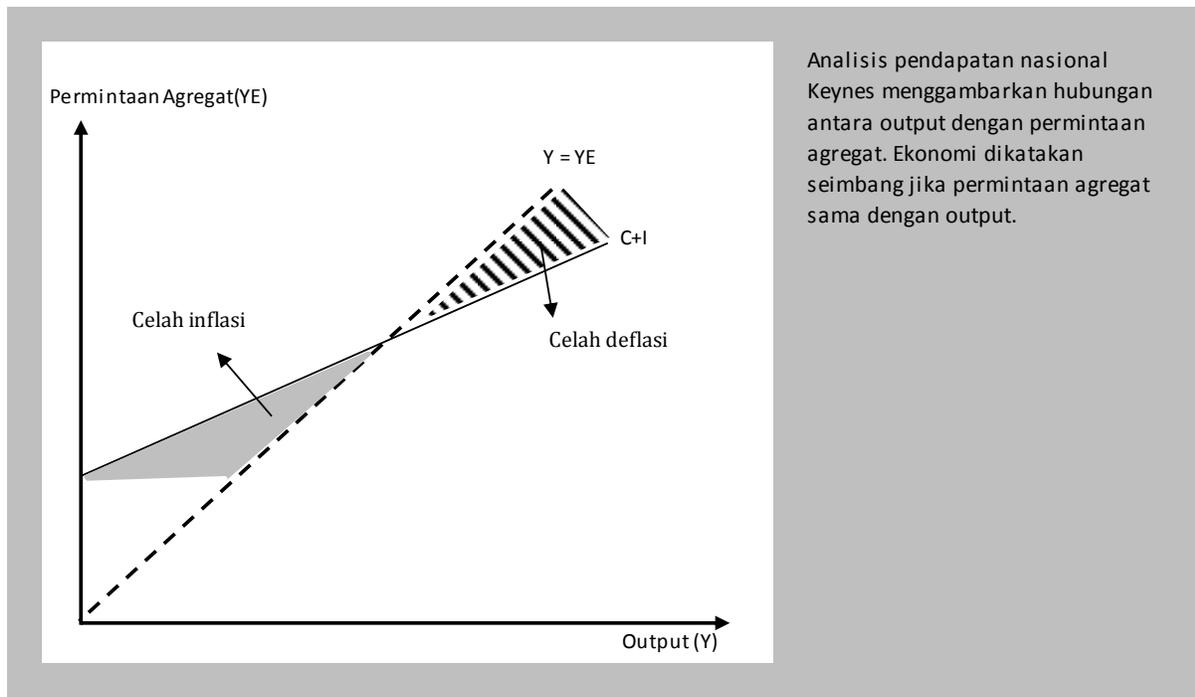
Secara sederhana konsep keseimbangan umum adalah keseimbangan penawaran dan permintaan. Keseimbangan inilah yang banyak diurai dalam mempelajari ekonomi makro. Di beberapa buku keseimbangan penawaran dan permintaan dijelaskan dengan tiga pendekatan antara lain model keseimbangan Keynes, keseimbangan model IS-LM, dan keseimbangan permintaan dan penawaran agregat (AD-AS). Di beberapa buku lainnya hanya dua pendekatan, keseimbangan Keynes dan keseimbangan AD-AS. Bahkan beberapa buku terbaru hanya satu penjelasan, keseimbangan AD-AS.

1. Model Keseimbangan Pengeluaran (Model Silang Keynes)

Secara sederhana dipahami bahwa keseimbangan merupakan kondisi di mana penawaran sama dengan permintaan. Dalam buku-buku ekonomi makro terkini penawaran

dianalogikan dengan pendapatan yang didapatkan oleh faktor produksi, yang sama dengan GDP pendekatan pengeluaran dalam bab sebelumnya. Dalam analisis pendapatan sederhana ini penawaran bersifat **endogen**. Sedangkan sisi permintaan merupakan nilai keseluruhan barang yang diminta adalah $(C + I)$ dalam perekonomian dua sektor, dan $C + I + G + X - M$ dalam perekonomian yang lebih lengkap. Karenanya, keseimbangan umum merupakan interseksi GDP output dengan GDP pengeluaran. Analisis ini merupakan analisis yang sederhana dalam perekonomian makro.

Menurut model ini analisis pendapatan nasional dapat digambarkan dalam sebuah grafik hubungan antara permintaan agregat di sisi Y (dikenal dengan istilah YE) dan penawaran agregat di sisi X (Y saja). Perhatikan gambar berikut.



Gambar 3.2 Keseimbangan menurut analisis pendapatan nasional Keynes

Kondisi keseimbangan terjadi saat YE sama dengan Y atau dalam gambar di atas ditunjukkan dengan garis lurus patah-patah yang membentuk sumbu 45° . Dengan kata lain jika $Y \neq YE$, maka perekonomian dalam kondisi tidak seimbang atau mengalami goncangan. Dikatakan memiliki celah inflasi (kontraksi) jika permintaan agregat lebih besar dari output, sebaliknya dikatakan memiliki celah deflasi (ekspansi) jika permintaan agregat lebih kecil dibandingkan output. Dengan kata lain, perekonomian memiliki celah deflasi jika output

tidak terserap di pasar, sebaliknya memiliki celah deflasi jika permintaan tidak bisa terpenuhi dari penawaran (output) yang ada.

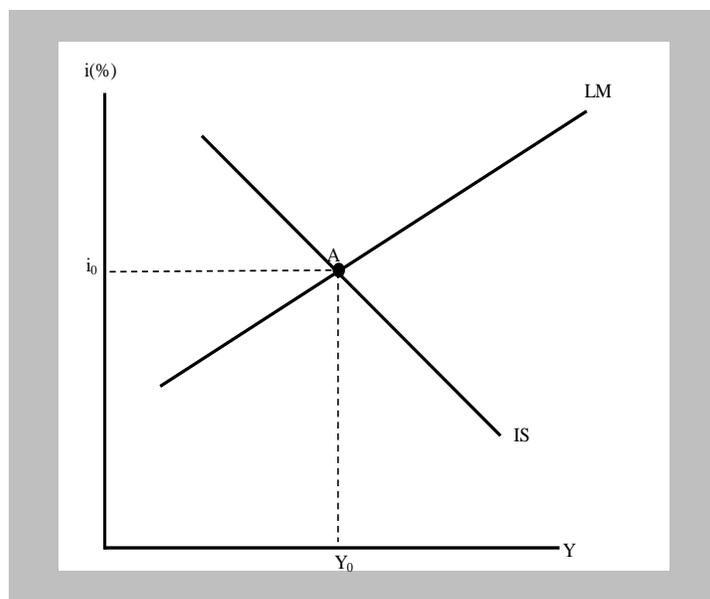
Model ini sangat bermanfaat ketika perekonomian makro menghitung efek pengganda (*multiplier effect*) dari variabel eksogen. Misalnya pemerintah menambah pengeluaran pemerintah sebesar n rupiah, bagaimana efeknya ke total output?. Dalam bab 4 akan dijelaskan secara detail perubahan-perubahan tersebut.

Analisis ini berasumsi bahwa tingkat simpanan (kebalikan dari konsumsi) tidak dipengaruhi tingkat suku bunga. Selain itu, tingkat suku bunga juga tidak berpengaruh pada investasi. Karenanya analisis mengabaikan pasar uang dan juga pasar tenaga kerja.

2. Model Keseimbangan Pasar Barang-Pasar Uang (IS-LM)

Pada model silang Keynes, investasi diasumsikan bersifat eksogen yang ini berbeda dengan kenyataan bahwa investasi sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Model keseimbangan ini memosisikan output pada sumbu X dan tingkat suku bunga pada sisi Y. Keseimbangan perekonomian terjadi saat kurva IS bersilangan dengan kurva LM. Kurva IS (kependekan dari *investment-saving*) menggambarkan hubungan antara output dengan tingkat suku bunga yang bergerak miring dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya investasi akan semakin besar jika tingkat suku bunga menurun yang pada akhirnya meningkatkan output.

Di sisi lain, kurva LM merupakan kurva hubungan antara output dan tingkat suku bunga yang diturunkan dari permintaan dan penawaran uang. Karenanya kurva ini disebut dengan kurva LM (*liquidity-money*) yang menggambarkan kecenderungan masyarakat (pelaku ekonomi) untuk memegang uang baik untuk tujuan transaksi maupun berjaga. Masyarakat akan cenderung meningkatkan penggunaan uang untuk bertransaksi jika pendapatan meningkat. Selanjutnya masyarakat akan cenderung menurunkan penggunaan uang untuk berjaga-jaga jika tingkat suku bunga. Selain itu, kecenderungan untuk memegang uang tersebut secara eksogen dipengaruhi jumlah uang yang beredar yang ditentukan oleh pemerintah. Secara umum keseimbangan IS-LM dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.3 Keseimbangan IS-LM

Pada titik A perekonomian dalam kondisi seimbang. Pada saat perekonomian mengalami guncangan (baik disebabkan dari dalam dan luar negeri), maka perekonomian tidak dalam kondisi seimbang. Karenanya pemerintah memiliki instrumen yang dapat mengembalikan perekonomian dalam kondisi yang dikenal dengan instrument fiscal dan moneter. Instrumen fiscal dapat berupa pengeluaran pemerintah, investasi; sedangkan instrument moneter berupa pengaturan jumlah uang beredar.

3. Model Keseimbangan Permintaan dan Penawaran Agregat (Analisis AD-AS)

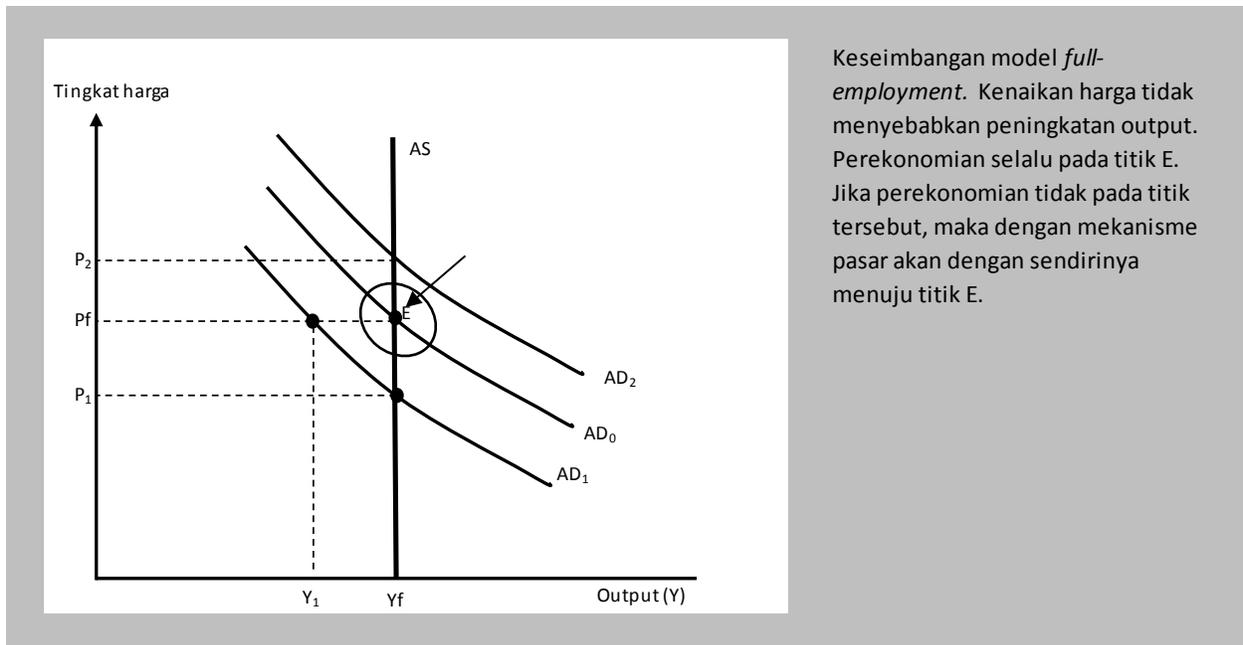
Pendekatan analisis yang ketiga adalah analisis keseimbangan permintaan dan penawaran agregat. Permintaan dalam ekonomi makro adalah hubungan antara nilai keseluruhan barang yang diminta oleh pelaku ekonomi dengan tingkat harga. Perkembangan diskusi ekonomi makro baru-baru ini lebih banyak mendasarkan pada analisis ini. Karena analisis ini dipandang lebih mewakili kondisi riil (nyata).

Secara umum penawaran adalah output yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Output yang ditawarkan dalam lingkup negara adalah Gross Domestic Bruto (GDP/PDB) dengan pendekatan output², sedangkan harga adalah harga secara umum. Karena Negara memiliki komoditas yang beragam, maka harga satu barang tidak dapat mencerminkan keseluruhan barang, maka dalam perhitungan harga menggunakan tingkat harga (INDEKS HARGA) (lihat bahasan inflasi).

² Lihat Mankiw (macroeconomics, 2003 hal 45).

Di sinilah awal mula perbedaan pendapat para ahli ekonomi di mana ekonom (ahli ekonomi) klasik berpendapat bahwa perekonomian akan dapat stabil dengan sendirinya, tanpa bantuan pemerintah. Sedangkan ahli ekonomi Keynes berpendapat ekonomi tidak dapat seimbang dengan sendirinya. Karenanya diperlukan peran pemerintah. Aliran Keynes lebih menekankan keseimbangan dari sektor permintaan dengan hanya sedikit (kurang berkonsentrasi) pada sektor penawaran. Ekonomi setelah Keynes atau yang disebut Post Keynes juga memberikan penekanan pada sisi penawaran (GDP output).

Keseimbangan merupakan hubungan antara permintaan keseluruhan (permintaan agregat) dan penawaran agregat. Keseimbangan *full-employment* ini dapat juga disebut keseimbangan dasar (*basic competitive equilibrium*). Selain itu, ada juga yang menyebut keseimbangan ini dengan keseimbangan pada lapangan kerja penuh (*full-employment equilibrium*). Hal ini dikarenakan lapangan kerja pada keseimbangan ini dapat kembali dengan sendirinya. Jika ada pengangguran, maka pengangguran hanya bersifat sesaat dan dapat kembali dengan sendirinya. Jika diformulasikan keseimbangan dasar adalah sebagai berikut. Dalam hal ini kurva penawaran bersifat elastis sempurna. Perhatikan gambar 3.3 dimana terdapat output (pendapatan nasional riil) dalam sumbu X, dan tingkat harga pada sumbu Y. Pada gambar tersebut, adanya perubahan harga (misalkan karena resesi ekonomi) tidak berpengaruh pada besarnya output (outputnya sama).



Keseimbangan model *full-employment*. Kenaikan harga tidak menyebabkan peningkatan output. Perekonomian selalu pada titik E. Jika perekonomian tidak pada titik tersebut, maka dengan mekanisme pasar akan dengan sendirinya menuju titik E.

Gambar 3.4 Keseimbangan Model Full-employment

Keseimbangan terdapat pada titik E, perpotongan antara AD_0 dan AS. Pada kondisi ini jumlah tenaga kerja pada kondisi full-employment-tenaga kerja penuh (meskipun kondisi ini masih ada pengangguran sebesar 3-7%). Juga, pada kondisi ini output pada kondisi optimal (namun masih dapat ditingkatkan lagi hingga tanpa pengangguran). Tidak ada perbedaan pendapat pada kondisi ini.

Selanjutnya, jika terdapat resesi maka terdapat pergeseran permintaan, misalkan dari AD_0 mengalami penurunan menjadi AD_1 , terdapat penurunan permintaan dari sebelumnya. Menurut golongan Klasik adanya pergeseran tersebut tidak menurunkan output, hanya menggeser harga menjadi lebih rendah (harga bersifat fleksibel). Sedangkan menurut golongan Keynes menyebabkan output mengalami penurunan dari Y_f ke Y_1 dan tingkat harga tetap.

Kedua pendapat ini bisa benar semua tergantung sudut pandangnya. Dalam jangka pendek, saat terjadi resesi perekonomian mengalami penurunan output pada kondisi Y_1 . Sehingga pendapat golongan Keynes benar, akan tetapi dalam jangka panjang ketika perekonomian sudah stabil, perekonomian akan mampu memproduksi pada output Y_f . Dalam kondisi ini golongan klasik cenderung benar.

Untuk mengembalikan perekonomian menuju keseimbangan, maka golongan (penganut) Keynes menggunakan beberapa langkah yang biasanya terkait dengan kebijakan fiskal, dan moneter. Sedangkan golongan klasik lebih berpendapat tentang interaksi kurva permintaan dan penawaran akan kembali stabil dengan sendirinya. Friksi-friksi ini menjadi corak dalam teori ekonomi makro. Friksi-friksi ini dapat dilihat dari pembahasan tingkat tabungan (pasar barang), tingkat suku bunga (pasar uang), dan besarnya upah (pasar tenaga kerja). Secara lebih detail dapat dijelaskan sebagai berikut.

Namun demikian, untuk memahami analisis keseimbangan permintaan agregat dan penawaran agregat (AD-AS), dibutuhkan cara menganalisis yang lebih sistematis dengan pendekatan (1) analisis investasi dan simpanan di pasar barang (IS), (2) analisis likuiditas dan uang dalam pasar uang (LM), dan (3) analisis pasar tenaga kerja. Poin 1 dan 2 merupakan cara untuk menjelaskan permintaan agregat (AD), dan poin ketiga merupakan cara untuk menjelaskan penawaran agregat (AS).

Baik analisis pendekatan silang Keynes maupun analisis pendekatan permintaan agregat dan penawaran agregat (AD-AS) memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karenanya, pembahasan-pembahasan dalam bab selanjutnya memasukkan dua analisis tersebut.

Perkembangan Pembahasan Ekonomi Makro dari Waktu ke Waktu

Pandangan Mazhab Klasik

Tokoh utama Mazhab ini adalah Adam Smith (1776) yang banyak dikenal dengan tokoh sistem ekonomi liberal *laissez faire* atau system yang memberikan kebebasan bagi setiap individu dalam menjalankan aktivitas ekonomi (tentunya dengan batasan hukum tertentu). Pandangan utama mazhab ini adalah setiap barang yang diproduksi akan diminta oleh pasar, atau dengan kata lain perekonomian tidak akan kekurangan permintaan. Hal ini berdasarkan pandangan Jean B. Say (1767-1832) yang dikenal dengan hukum Say yang mengatakan bahwa penawaran akan menciptakan sendiri permintaannya, "*supply creates its own demand*". Dalam implikasinya, pandangan ini menyebar ke pandangan tentang konsumsi, tingkat pengangguran, dan tingkat suku bunga. Ekonom-ekonom yang termasuk dalam mazhab ini adalah D. Ricardo, A. Marshall, V. Pareto, dan lain-lain.

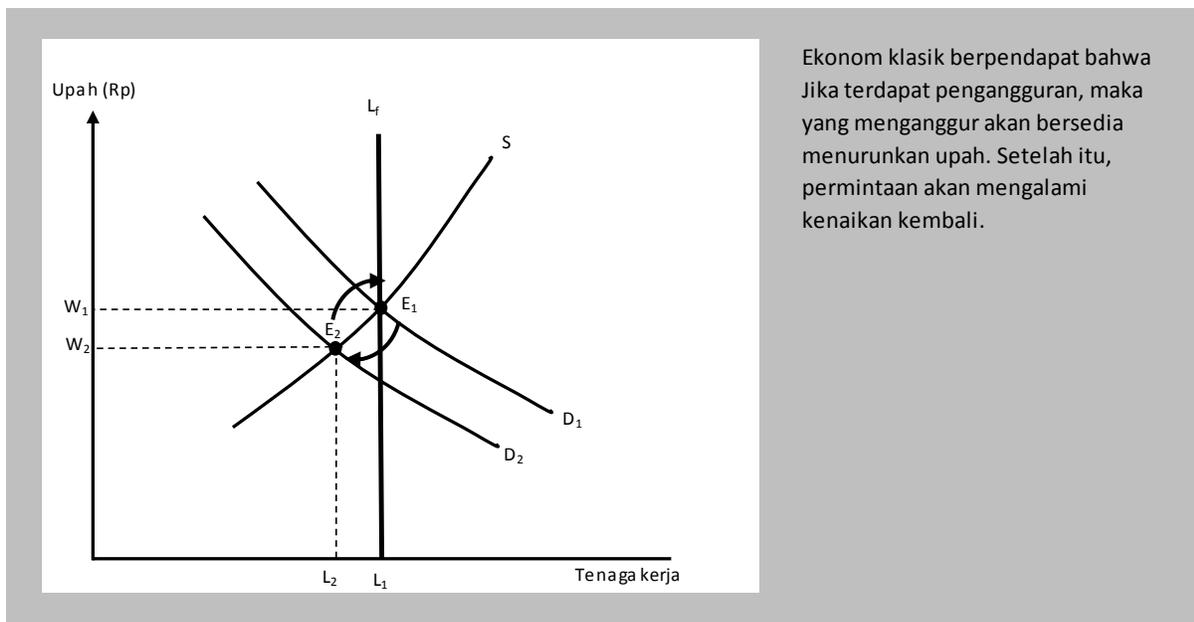
- Pasar Barang

Dalam pasar barang, naik turunnya harga ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Logika yang dibangun adalah misalkan barang A yang dijual di pasar pada harga tertentu dan dalam waktu tertentu tidak laku, maka mekanisme harga akan mengatur ini, dan secara otomatis harga barang akan mengalami penurunan. Sebagai dampaknya, permintaan akan barang meningkat kembali dengan menurunnya harga.

Dalam skala yang lebih luas (makro), pemerintah tidak perlu melakukan campur tangan apapun. Misalkan terjadi resesi, kekuatan pasar akan mengarahkan ke ke kondisi seimbang. Di pasar barang dua hal mendasar mazhab klasik adalah (1) seperti yang dikatakan hukum Say bahwa penawaran menciptakan permintaannya sendiri, dan (2) harga barang selalu bersifat fleksibel.

- Pasar Tenaga Kerja

Tetap simpan di pikiran bahwa mazhab klasik selalu berpedoman bahwa interaksi pasar mengarahkan kondisi perekonomian pada keseimbangan. Di pasar tenaga kerja, apabila terjadi pengangguran, maka pasar akan dapat menyesuaikan sendiri, sehingga pengangguran dapat teratasi. Apabila terjadi pengangguran, maka yang menganggur akan bersedia untuk bekerja pada harga yang lebih rendah dari yang berlaku di pasar. Ekonom klasik berpendapat bahwa pengusaha akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan maksimal yang dapat dicapai jika upah sama dengan produk marginal.



Gambar 3.5 Keseimbangan Tenaga kerja menurut Mazhab Klasik dan Keynes

Pada kondisi keseimbangan, tenaga kerja sebanyak L_1 dan upah sebesar W_1 . Adanya resesi menyebabkan permintaan mengalami penurunan dari D_1 ke D_2 , akibatnya terjadi pergeseran upah dari W_1 ke W_2 . Ekonom klasik berpendapat bahwa pada tingkat upah tersebut, beberapa tenaga bersedia untuk tidak bekerja. Akibatnya jumlah tenaga kerja berkurang. Setelah itu upah mengalami kenaikan kembali hingga kembali pada W_1 . Akhirnya jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan kembali, dan keseimbangan bergeser ke E_1 .

- Pasar Uang

Pasar uang merupakan keseimbangan antara jumlah uang yang diminta dengan jumlah uang yang ditawarkan. Uang yang ditawarkan merupakan kewenangan pemerintah melalui lembaga keuangan. Selanjutnya terkait permintaan akan uang, ekonom klasik berpendapat bahwa permintaan uang akan tergantung pada kebutuhan untuk transaksi (tukar menukar), artinya untuk bertransaksi barang dan jasa. Teori ini dikatakan dengan teori kuantitas.

Selanjutnya kebutuhan transaksi tergantung akan dua hal yaitu jumlah barang atau jasa dan tingkat harga umum. Semakin besar GDP, maka akan semakin banyak transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Misalkan penawaran uang adalah M_s , dan permintaan uang adalah M_d , maka secara matematis, dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$M_s = M_d$$

$$M_s = kP.Q$$

M_s merupakan penawaran uang yang besarnya ditentukan oleh pemerintah. k merupakan konstanta yang lebih ditentukan faktor kelembagaan seperti frekuensi pembayaran gaji (mingguan, bulanan, dan lainnya). Q merupakan kuantitas barang yang ditentukan di pasar barang (bukan di pasar uang). Di pasar uang, jumlah barang cenderung konstan. Dengan demikian tingkat harga umum akan tergantung jumlah uang yang disediakan oleh pemerintah. Artinya peningkatan jumlah uang yang disediakan pemerintah akan berpengaruh pada tingkat harga umum. Contoh pemerintah menambah jumlah uang yang beredar sebanyak 5%, maka tingkat harga umum akan meningkat sebesar 5% juga.

- Pasar Luar negeri

Di pasar luar negeri, ekonom klasik tetap berpendapat bahwa secara otomatis perekonomian dunia akan menuju keseimbangan. Ekonom klasik mensyaratkan satu diantara dua hal agar pasar luar negeri dapat seimbang dengan sendirinya, yaitu (1) pasar mengaplikasikan system standar emas, dan (2) standar kertas dan kurs devisa yang fleksibel.

Jika Negara di dunia semua menggunakan standar emas, maka perekonomian masing-masing negara akan mempunyai system neraca yang dapat mengkoreksi ketidakseimbangan secara otomatis. Misalkan Negara kita ekspor lebih banyak, artinya cadangan emas yang ada dalam negeri akan lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan jumlah emas (uang) mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah persediaan uang akan menyebabkan terjadi kenaikan tingkat harga secara umum (ingat hukum kuantitas dalam pasar uang). Karena kenaikan harga-harga barang tersebut menyebabkan terjadinya impor. Akhirnya jumlah impor mengalami kenaikan dan ekspor mengalami penurunan. Kondisi ini seperti yang dijelaskan oleh D. Hume (1711-1776) yang merupakan pendahulu dari A. Smith.

Pandangan Mazhab Keynes

Mazhab Keynes mengemuka saat krisis yang terjadi di Inggris di mana setelah perekonomian mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, akhirnya mengalami kemunduran dan akhirnya jatuh dalam kondisi krisis pada periode tahun 1930an. Mazhab Keynes diprakarsai oleh J. M. Keynes dan dianggap sebagai bapak Ekonomi Modern. Keynes mengkonter (menjawab) pernyataan Say bahwa penawaran dapat menciptakan permintaannya sendiri. Malahan Keynes berpendapat bahwa permintaan menentukan penawaran output dan tingkat tenaga kerja. Saat permintaan naik, maka kondisi perekonomian berada dalam kondisi baik. Kebijakan ekonomi Keynes yang penting adalah penciptaan uang (kebijakan keuangan), pemotongan pajak dan penambahan pengeluaran pemerintah (kebijakan fiskal). Pandangan-pandangan Keynes ini merupakan pandangan yang banyak diajarkan di universitas-universitas di dunia pada abad 20. Meskipun demikian, terdapat ekonom-ekonom yang kurang sepakat dengan mazhab ini seperti M. Friedman (1912-2006) dan R.E.Lucas (1937-....) yang dikenal dengan ekonom new klasik atau ekspektasi rasional.

- **Pasar Barang**

Berawal dari penolakan hukum Say, maka ekonom Keynes berpendapat bahwa terdapat kemungkinan kelebihan produksi dan kekurangan produksi, artinya tidak semua barang yang diproduksi akan diminta di pasar juga sebaliknya barang yang diminta pasar belum tentu tersedia. Kelebihan ini dapat terjadi karena lemahnya permintaan pasar. Teori dasar yang paling banyak dipakai adalah teori konsumsi yang menyatakan bahwa konsumsi barang sangat ditentukan oleh pendapatan (pendapatan siap pakainya) dan juga oleh keinginan untuk mengkonsumsi sekarang dan mengkonsumsi pada masa yang akan datang atau yang dikenal dengan istilah *marginal propensity to consume* (MPC). Jika seseorang ingin banyak mengkonsumsi pada masa yang akan datang, tentunya perlu banyak menabung (mengurangi konsumsi sekarang).

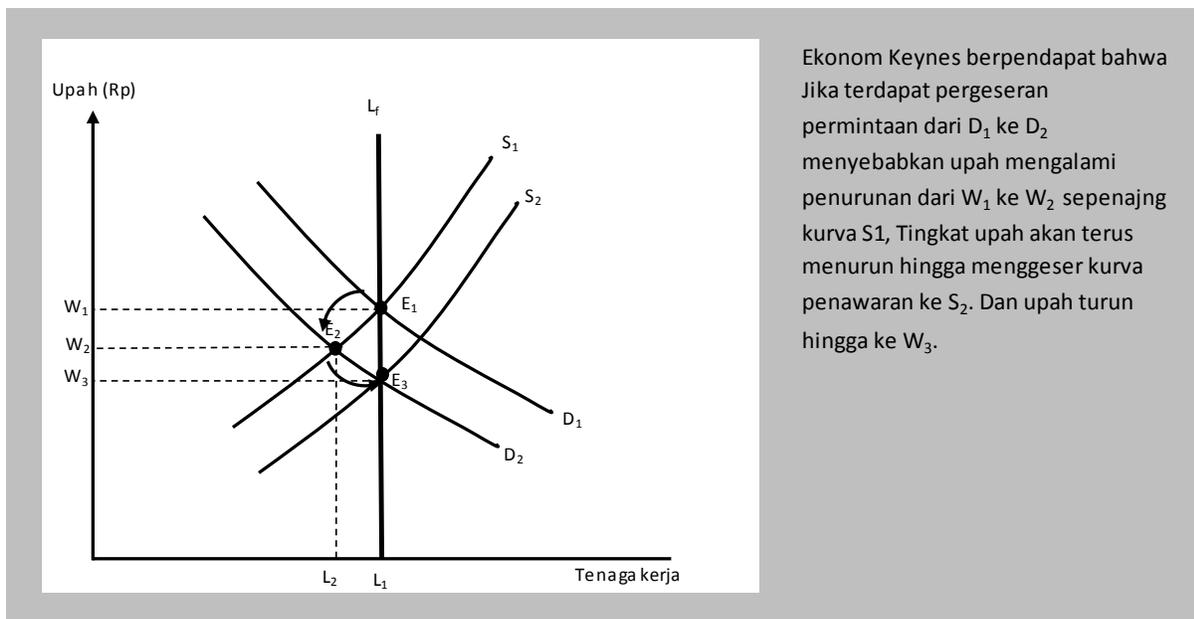
Hal mendasar lainnya yang banyak digunakan sekarang adalah adanya efek pengganda (*multiplier effect*). Artinya sebuah kebijakan yang dikeluarkan dari sisi pengeluaran akan memiliki efek pengganda, terutama pada konsumsi. Lebih detail akan dibahas dalam bab Analisis Pendapatan Nasional (Analisis Silang Keynes).

- Pasar uang

Menurut Keynes permintaan akan uang bukan hanya dikarenakan keinginan masyarakat untuk bertransaksi saja (seperti hukum kuantitas mazhab klasik), akan tetapi juga karena factor keinginan untuk berjaga-jaga (pada masa yang akan datang) dan juga keinginan untuk berspekulasi. Konsekuensi pentingnya adalah tingkat suku bunga akan ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran uang itu sendiri. Pembahasan lebih detail akan dibahas pasar uang.

- Pasar Tenaga Kerja

Mazhab klasik berpendapat bahwa upah bersifat fleksibel yang artinya interaksi permintaan dan penawaran menyebabkan kenaikan dan penurunan upah. Mazhab memiliki cara pandang yang berbeda. Adanya sebab tertentu (misalnya resesi) akan menyebabkan penurunan permintaan yang menggeser kurva permintaan dari D_1 ke D_2 . Pada saat tersebut upah mengalami penurunan dari W_1 ke W_2 . Setelah itu upah terus mengalami penurunan hingga ke W_3 . Pada saat tersebut permintaan akan tenaga kerja mengalami kenaikan hingga ke L_2 .



Gambar 3.6 Keseimbangan Tenaga kerja menurut Mazhab Keynes

- Pasar Luar Negeri

Pasar luar negeri mazhab Keynes ditekankan pada keseimbangan antara ekspor dan impor di mana jika ekspor terlalu banyak, maka harga-harga barang dalam negeri akan cenderung mengalami kenaikan. Akibatnya akan terjadi inflasi.

Pandangan Post Keynes

Keynes telah banyak memberikan dasar berlakunya system perekonomian secara makro. Namun demikian, beberapa ahli ekonomi mengkritik pandangan-pandangan Keynes tersebut. Keynes lebih banyak mendasarkan analisis pada permintaan agregat (pengeluaran) terutama pengeluaran pemerintah. **M. Friedmen** merupakan salah satu contoh yang kurang sepakat dengan pendapat Keynes terutama dalam hal pengeluaran agregat. Menurutnya pengeluaran agregat yang berlebihan akan cenderung mengarah pada inflasi yang terlalu tinggi, dan itu tidak baik dalam perekonomian. Selain itu Friedman juga lebih menekan kebijakan keuangan dalam menentukan kegiatan ekonomi.

Selanjutnya ahli ekonomi lain yang kurang sepakat dengan Keynes datang dari **R. E. Lucas** yang berasal dari keluarga pengusaha yang usahanya terdampak krisis tahun 1930an. Pengusaha akan dapat memahami kondisi perekonomian dari sudut pandang masa lalu dan pada masa yang akan datang. Sehingga dia lebih menekankan kondisi perekonomian dari sudut pandang ekonomi mikro (pelaku usaha). Poin pentingnya adalah tidak ada kondisi dalam jangka pendek antara inflasi dan pengangguran, artinya perekonomian akan dapat stabil dengan sendirinya. Selain itu pendapat Lucas ini menjembatani antara ekonom klasik dan ekonom Keynes, sehingga dikenallah pandangan tentang ekspektasi rasional atau golongan ekonom klasik baru.

Namun demikian, diantara ekonom-ekonom yang kurang sepakat dengan Keynes terdapat ekonom yang tetap sependapat dengan Keynes tanpa menyalahkan pandangan klasik dan berupaya menggabungkan keduanya. Salah satunya adalah **J. Stiglitz** yang pernah bekerja sebagai Penasehat Ekonomi Presiden Clinton. Selain itu Stiglitz juga pernah menjabat sebagai Ketua Ahli-ahli Ekonomi di Bank dunia. Pada saat itu Stiglitz tidak sepakat dengan suku bunga tinggi yang dibebankan pada Negara miskin yang pinjam uang di bank dunia tersebut. Karenanya Stiglitz keluar dari Bank dunia dan dunia politik dan kembali ke bidang akademis dan mengajar di Universitas Columbia. Ide penting Stiglitz adalah pasar tidak selalu

bekerja secara sempurna, artinya terdapat kegagalan pasar yang disebabkan karena ketidaksempurnaan informasi. Dalam menjelaskan konsepnya tentang ekonomi makro, dia sepakat dengan Lucas akan tetapi diakhirnya dia sepakat bahwa untuk mencapai kondisi tersebut bukanlah sesuatu yang mudah dan kebanyakan gagal atau yang disebut dengan kegagalan pasar. Karenanya, dia dikenal sebagai penganut Mazhab **Keynesian baru**.

Istilah-istilah Penting

Business cycle

Keseimbangan model *full-employment*

Mazhab klasik

Mazhab Keynes

Mazhab Ekspektasi rasional

Mazhab Klasik Baru

Mazhab Keynes Baru

Analisis keseimbangan model Keynes

Analisis keseimbangan *investment-saving* dan *liquidity moneter* (IS-LM)

Analisis keseimbangan *agregat demand* dan *agregat supply* (AD-AS)

Celah inflasi

Celah deflasi

Pertanyaan Jawaban Pendek

1. Secara umum terdapat tiga aliran (mazhab) penting dalam ekonomi makro yaitu
2. Mazhab yang lebih mementingkan peran (campur tangan) pemerintah dalam perekonomian di sebut dengan.....
3. Mazhab yang lebih menekankan keseimbangan interaksi pasar (permintaan dan penawaran) disebut dengan
4. Apa preseden (kejadian sebelumnya) yang memicu Keynes untuk memunculkan teori pasar dengan pengaruh pemerintah?
5. Pergerakan (naik turunnya) perekonomian dari waktu ke waktu disebut dengan
6. Kondisi di mana perekonomian (*output*) berada pada kondusu *full-employment* disebut dengan
7. Terdapat dua analisis utama dalam ekonomi makro yaitu
8. Terdapat pendekatan (cara) tambahan untuk menjelaskan analisis pendapatan dengan metode permintaan dan penawaran agregat (AD-AS) yang disebut dengan pendekatan.....
9. Menurut analisis pendapatan nasional silang Keynes, keseimbangan perekonomian adalah.....
10. Menurut Model Keseimbangan Pengeluaran (silang Keynes), celah deflasi terjadi ketika

11. Menurut Model Keseimbangan Pengeluaran (silang Keynes), celah inflasi terjadi ketika

Pertanyaan Jawaban Benar Salah

1. *Business cycle* merupakan pergerakan (naik turunnya) kondisi perekonomian dari waktu ke waktu.
2. Analisis pendapatan nasional yang mendasarkan pada hubungan antara output dan permintaan agregat disebut dengan analisis pendapatan nasional permintaan dan penawaran agregat.
3. Menurut golongan (mazhab) klasik, keseimbangan perekonomian tidak dapat seimbang dengan sendirinya akan tetapi perlu peran pihak pemerintah.
4. Menurut analisis model Silang Keynes, celah deflasi terjadi ketika permintaan agregat lebih besar dibandingkan dengan penawaran agregat.

---000---

4.

Model Keseimbangan Pengeluaran Dua Sektor

Mengapa Anda Perlu Tahu

Ketika seseorang bekerja pada perusahaan atau pemerintah maka dia akan mendapatkan gaji. Tentu, gaji yang didapatkan perlu dipotong pajak yang dibayarkan ke pemerintah. Selanjutnya gaji yang didapatkan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bermacam jumlahnya, mulai dari pangan, pakaian, dan lainnya. Jika ada sisanya (tergantung manajemen keuangannya) maka uang tersebut digunakan untuk simpanan atau investasi. Contoh tersebut merupakan gambaran seseorang saja dalam sebuah perekonomian. Bisa jadi, orang lain memiliki struktur pengeluaran yang berbeda. Bagaimanakah memodelkan kondisi secara umum (seluruh warga Negara)?

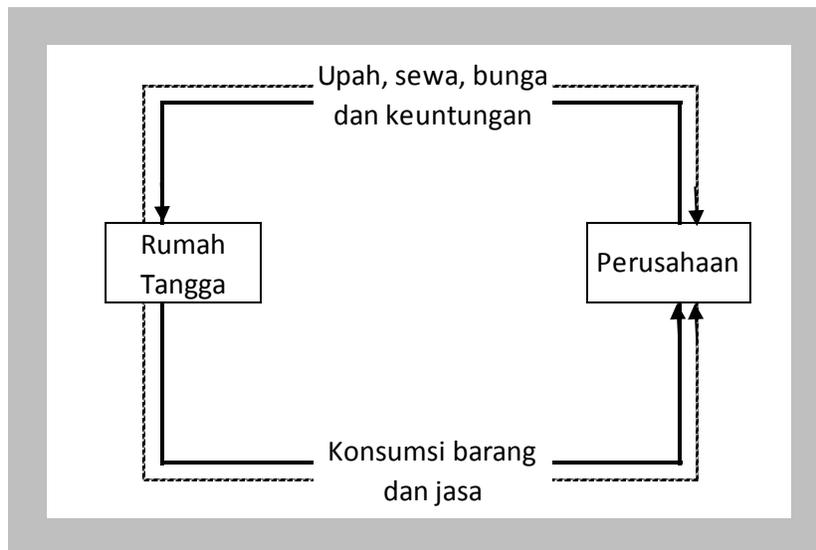
Bab ini menjelaskan model keseimbangan dengan pendekatan model Keynes atau dikenal model keseimbangan pengeluaran. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa pengeluaran pemerintah terdiri dari konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor bersih (X-M). Pembahasan Keynes berangkat dari kondisi perekonomian yang tidak seimbang, artinya output tidak sama dengan pengeluaran agregat, $Y \neq Y^E$.

Keynes menganalisis perekonomian menurut dua sektor, tiga sektor, dan empat sektor (perekonomian terbuka). Meskipun perumpamaan dua sektor sangat jarang ditemui dalam perekonomian sekarang ini, namun pemahaman ini sangat membantu dalam menjelaskan hubungan antara rumah tangga dan perusahaan terutama memberikan dasar bahwa pemilik perusahaan adalah juga rumah tangga.

Perekonomian Dua Sektor

Untuk memudahkan pemahaman, perekonomian dimisalkan hanya ada dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan³. Sektor rumah tangga merupakan sektor pemilik tenaga kerja, sedangkan sektor perusahaan merupakan sektor yang menggunakan tenaga kerja.

³ Meskipun pembahasan dua sektor sulit ditemui sekarang, namun ini adalah kerangka dasar berpikir.



Gambar 4.1 Diagram alir siklus perekonomian sederhana (dua sektor)

Gambar tersebut menunjukkan aliran siklus perekonomian sederhana yang dijelaskan sebagai berikut (1) rumah tangga sebagai pemilik faktor produksi memperoleh pendapatan berupa upah, sewa, bunga dan keuntungan; (2) Sebagian pendapatan yang diperoleh pemilik faktor produksi (rumah tangga) digunakan untuk konsumsi; (3) sebagian pendapatan (yang tidak digunakan untuk konsumsi) digunakan sebagai tabungan; (4) perusahaan meminjam dana dari rumah tangga untuk investasi.

Dua hal penting dari aliran di atas adalah bahwa output perekonomian ditentukan oleh konsumsi dan investasi. Menurut Keynes konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan siap digunakan (*disposable income*). Sedangkan investasi adalah variabel eksogen. Mari kita bahas satu persatu.

Konsumsi

Misalkan rumah tangga memiliki pendapatan Rp 1 juta, apakah pendapatan tersebut digunakan semua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Atau sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan sebagian lainnya disimpan untuk memenuhi kebutuhan berjaga-jaga.

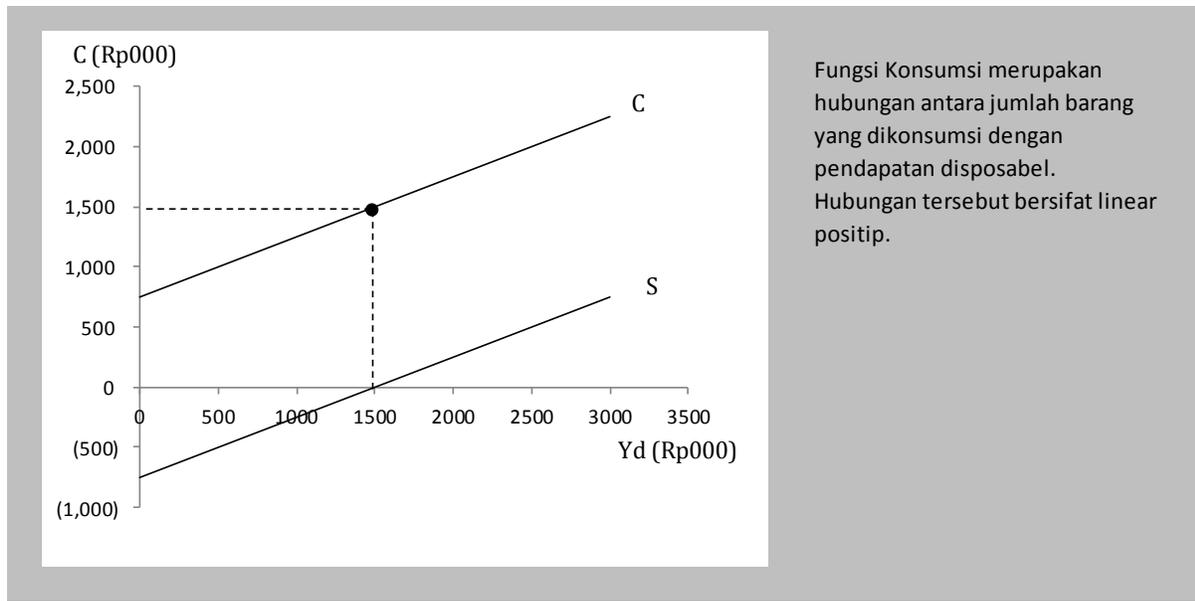
Ilustrasi Pendapatan Disposable, Konsumsi dan Tabungan

Misalkan rumah tangga memiliki struktur pendapatan dan pengeluaran sebagai berikut. Saat belum bekerja (pendapatan = 0), konsumsi sama dengan Rp 750 ribu, saat pendapatan Rp 500 ribu konsumsinya sebesar Rp 1 juta, dan seterusnya (lihat tabel 4.1). Hal yang perlu dicermati adalah saat pendapatan 0, rumah tangga tersebut sudah berkonsumsi yang diambil dari simpanan. Sehingga simpanan Rp -750 ribu.

Tabel 4.1 Ilustrasi pendapatan disposable, konsumsi dan tabungan rumah tangga

Pendapatan disposabel	Konsumsi	Tabungan
0	750	-750
500	1,000	-500
1,000	1,250	-250
1,500	1,500	0
2,000	1,750	250
2,500	2,000	500
3,000	2,250	750

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada saat pendapatan Rp 1.500, konsumsi sebesar Rp 1.500 ribu artinya semua pendapatan digunakan untuk konsumsi. Dengan kata lain tidak ada pendapatan yang digunakan sebagai simpanan. Jika dibuat dalam sebuah grafik hubungan antara konsumsi dan pendapatan disposable, maka didapatkan grafik sebagai berikut.



Gambar 4.2 Hubungan antara konsumsi, pendapatan disposable dan simpanan.

Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. $Yd = C + S$, artinya pendapatan disposable digunakan untuk konsumsi dan juga untuk simpanan (saving),
2. Pada pendapatan disposable sebesar 0, maka konsumsi sebesar Rp 750. Hal ini berarti bahwa terdapat konsumsi yang tidak langsung terkait dengan pendapatan yang disebut dengan konstanta yang bersifat eksogen terhadap pendapatan, atau disimbolkan dengan \bar{C} .
3. Kemiringan (*slope*) garis C tergantung berapa besarnya pendapatan yang digunakan untuk konsumsi. Berdasarkan hitungan di atas, kemiringan garis C adalah 0.5; artinya 50% jumlah pendapatan disposable digunakan untuk konsumsi, sedangkan sisanya, 50% digunakan untuk simpanan.
4. Pada pendapatan tertentu, rumah tangga bersedia untuk menabung. Dalam grafik di atas, setelah pendapatan Rp 1,500 ribu, sebagian pendapatan digunakan sebagai simpanan.
5. Pada perekonomian dua sektor Pendapatan perseorangan (Yd) sama sama dengan output (Y) karena tidak ada pengeluaran pemerintah.

Dengan demikian fungsi konsumsi dapat dibuat dalam formulasi matematis :

$$C = \bar{C} + cYd$$

Di mana C adalah tingkat konsumsi, \bar{C} adalah konsumsi pada saat pendapatan disposable sama dengan 0, c adalah slope konsumsi atau marginal propensity to consume (MPC), Yd adalah pendapatan siap pakai.

Pendapat Keynes tentang fungsi konsumsi sangat mendasar sekali dan banyak digunakan ekonom-ekonom lain termasuk buku-buku ekonomi makro sekarang ini. Menurutnya, keputusan seseorang untuk mengkonsumsi seseorang tergantung dari pendapatan disposablenya dan juga keinginan untuk menggunakan atau menyimpan pendapatan tersebut. Jika pendapatan seseorang digunakan semuanya untuk kebutuhan konsumsi, maka dia tidak memiliki pendapatan lagi yang bisa digunakan pada masa yang akan datang.

Telah diuraikan di atas bahwa pendapatan disposable digunakan untuk konsumsi dan saving. Jika sebagian besar pendapatan tersebut digunakan untuk konsumsi, maka hanya sebagian kecil saja yang digunakan untuk saving, dan sebaliknya. Di Negara maju pendapatan yang digunakan konsumsi sebesar 65%, dan sisanya, 35% digunakan untuk saving. Berbeda dengan dengan Negara berkembang yang menggunakan sebagian besar (90% atau lebih) pendapatan disposable-nya untuk konsumsi. Jika dijumlahkan kecenderungan untuk mengkonsumsi ditambah kecenderungan untuk saving sama dengan 1.

Fungsi konsumsi akan selalu terbalik dengan fungsi simpanan, hal ini karena pada perekonomian sederhana, jika pendapatan disposable (Y_d) yang dimiliki tidak digunakan untuk mengkonsumsi, maka pendapatan tersebut digunakan sebagai simpanan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Karenanya, fungsi simpanan adalah sebagai berikut.

$$Y_d = C + S$$

$$Y_d = \bar{C} + cY_d + S$$

$$(1-c) Y_d = \bar{C} + S$$

$$\text{Sehingga } S = -\bar{C} + (1 - c)Y_d$$

Kecenderungan untuk Mengkonsumsi dan Menyimpan

Masing-masing rumah tangga memiliki perbedaan kecenderungan untuk melakukan konsumsi. Namun demikian secara general, kecenderungan tersebut dapat digambarkan secara sederhana. Kembali ke contoh dalam tabel 4.1 di atas. Saat pendapatan disposable sebesar Rp 500 ribu, konsumsinya sebesar Rp 1 juta. Saat pendapatan meningkat menjadi 1 juta pendapatan meningkat menjadi Rp 1,25 juta. Artinya konsumsi mengalami perubahan sebesar Rp 250 ribu saat pendapatan mengalami perubahan sebesar Rp 500 ribu. Secara detail, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.2 Perubahan konsumsi, tabungan akibat adanya perubahan pendapatan

Pendapatan disposabel	Konsumsi	Tabungan	ΔYd	ΔC	MPC	APC	<i>Marginal propensity to consume</i> (MPC atau c) merupakan perubahan konsumsi akibat adanya perubahan pendapatan disposabel. <i>Average propensity to consume</i> merupakan rasio antara konsumsi dan pendapatan disposabel.
0	750	(750)					
500	1,000	(500)	500	250	0.50	2.00	
1,000	1,250	(250)	500	250	0.50	1.25	
1,500	1,500	0	500	250	0.50	1.00	
2,000	1,750	250	500	250	0.50	0.88	
2,500	2,000	500	500	250	0.50	0.80	
3,000	2,250	750	500	250	0.50	0.75	

Kecenderungan mengkonsumsi barang dapat dijelaskan dengan dua konsep yaitu, kecenderungan mengkonsumsi marginal (*marginal propensity to consume*-MPC), dan kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (*average propensity to consume*-MPC). Jika perubahan konsumsi disimbulkan dengan ΔC , dan perubahan pendapatan disposable disimbulkan dengan ΔYd , juga perubahan disimbulkan dengan MPC, maka MPC adalah kecenderungan untuk mengkonsumsi merupakan perubahan konsumsi (ΔC) akibat adanya perubahan pendapatan disposable (ΔYd). Secara matematis MPC dapat dituliskan sebagai berikut.

$$MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Yd}$$

dan APC dapat dituliskan sebagai berikut.

$$APC = \frac{C}{Yd}$$

Beberapa hal penting terkait teori kecenderungan mengkonsumsi:

1. Nilai tambahan kecenderungan untuk mengkonsumsi (*marginal propensity to consume*, MPC) mulai dari 0 hingga 1. Secara matematis diformulasikan sebagai berikut.

$$C = \bar{C} + cYd$$

Di mana \bar{C} adalah konsumsi (tanda bar berarti variabel tersebut bersifat eksogen), Yd adalah pendapatan disposable, dan c adalah *marginal propensity to consume*, MPC.

MPC dapat bernilai sama sepanjang perubahan pendapatan disposable dan juga dapat berbeda. Hal tergantung masing-masing individu.

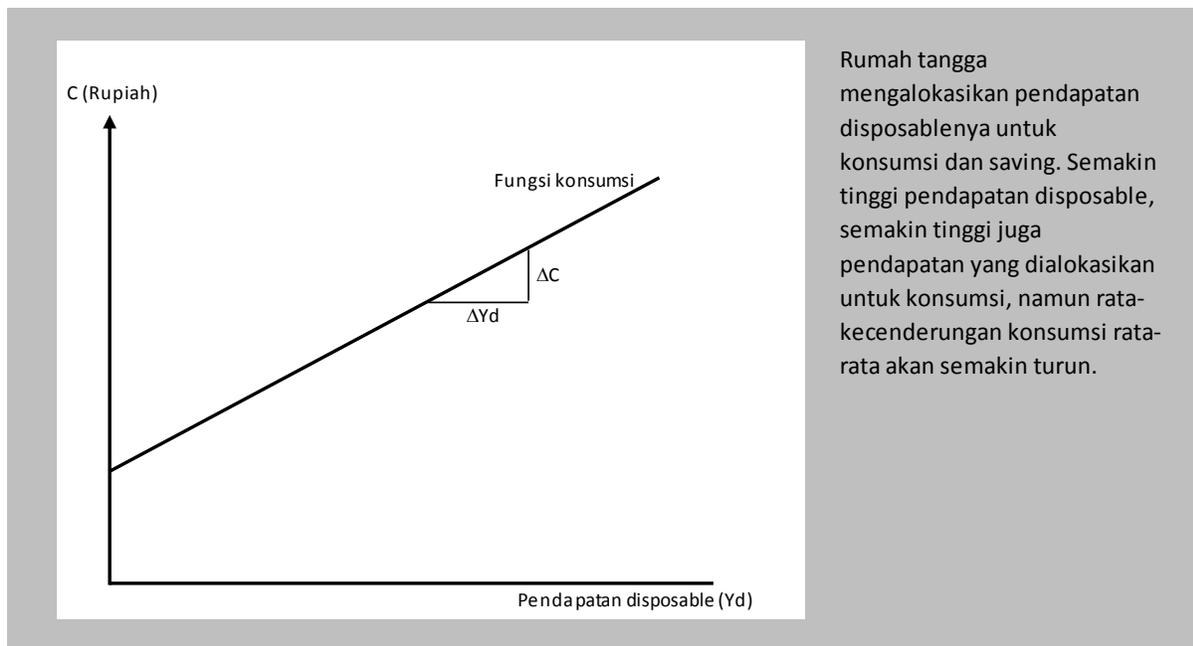
2. Rasio konsumsi dan pendapatan (*average propensity to consume, APC*) menurun dengan meningkatnya pendapatan. Artinya saving merupakan barang mewah di mana orang kaya dapat menyimpan lebih dibandingkan orang miskin.

$$APC = C/Y,$$

$$APC = \bar{C}/Y + c$$

Formulasi tersebut berarti bahwa meningkatnya pendapatan akan mengurangi kecenderungan konsumsi rata-rata.

Secara grafis MPC dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.3 Kecenderungan untuk mengkonsumsi (marginal propensity to consume -MPC).

Nilai MPC dapat tetap sepanjang pendapatan disposable dan juga dapat berubah. Nilai yang tetap menyebabkan slope-nya berbentuk linear, sedangkan nilai yang berbeda menyebabkan slope-nya tidak rata. Perbedaan tersebut tergantung masing-masing individu (dalam skala rumah tangga) atau Negara (dalam skala negara).

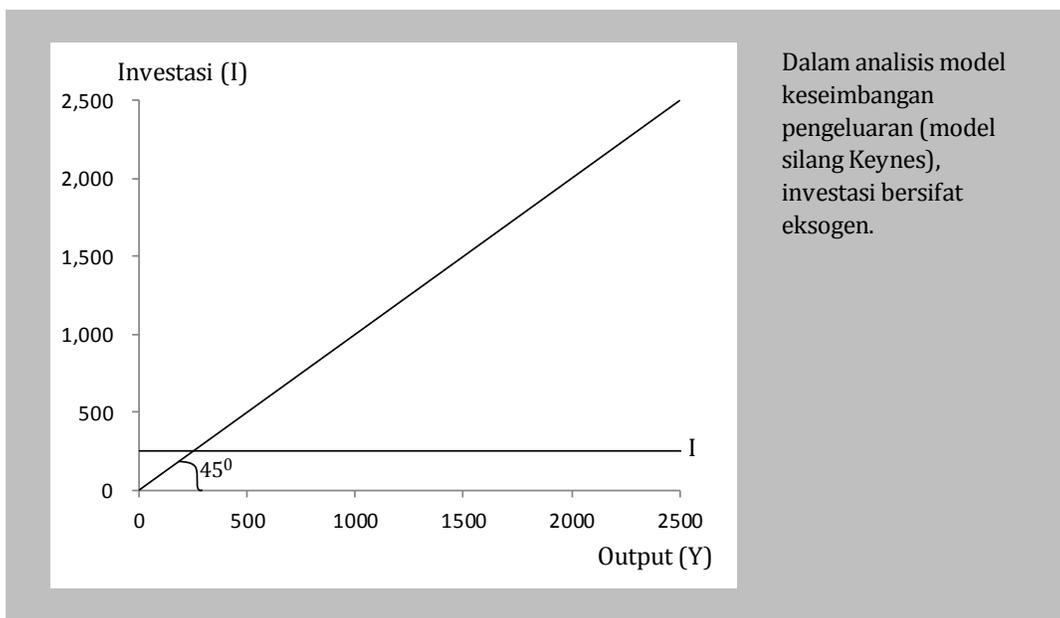
Investasi

Selanjutnya, perekonomian dua sektor melibatkan investasi, I. Investasi adalah pengeluaran modal untuk membeli barang-barang modal (tahan lama) untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah pada masa yang akan datang. Investasi juga diartikan upaya memperbaharui barang-barang yang telah lama dipakai.

Menurut Keynes, investasi merupakan fungsi eksogen output, sehingga tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan individu. Sehingga fungsi investasi berpengaruh langsung pada pendapatan nasional bukan pada pendapatan individu siap pakai (Y_d). Secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut. Karena variabel investasi eksogen terhadap pendapatan maka diberi tanda bar, \bar{I}

$$Y = \bar{I}$$

Misalkan investasi dalam perekonomian sebesar Rp 250 ribu yang bersifat tetap. Secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.4 Hubungan investasi (I) dan output (Y)

Grafik tersebut menekankan bahwa investasi bersifat eksogen terhadap output. Ini kelihatannya kurang logis sekarang ini. Hal yang ingin ditekankan Keynes adalah efek perubahan eksogen (misal: investasi) terhadap output melalui mekanisme konsumsi.

Keseimbangan Perekonomian Negara

Pertanyaan mendasar adalah kenapa perekonomian perlu diseimbangkan?. Karena perekonomian berada dalam kondisi yang tidak seimbang akan adanya gangguan perekonomian. Pada saat tersebut bisa jadi konsumsi lebih rendah dibandingkan produksi (output). Karenanya, perekonomian perlu diseimbangkan. Keseimbangan perekonomian model pengeluaran dua sektor mempertemukan output (Y) dan pengeluaran (C + I). Pada titik di mana $Y = C + I$ maka keseimbangan perekonomian tercapai (kondisi *full-employment*).

Penjelasan Matematis

Keseimbangan perekonomian dua sektor dapat dicari dengan pendekatan matematis:

$$Y = C + I$$

$$Y = \bar{C} + cYd + \bar{I}$$

Pada perekonomian sederhana Yd sama dengan Y , sehingga

$$Y - cY = \bar{C} + \bar{I}$$

$$Y(1-c) = \bar{C} + \bar{I}$$

$$Y = \frac{\bar{C} + \bar{I}}{1-c}$$

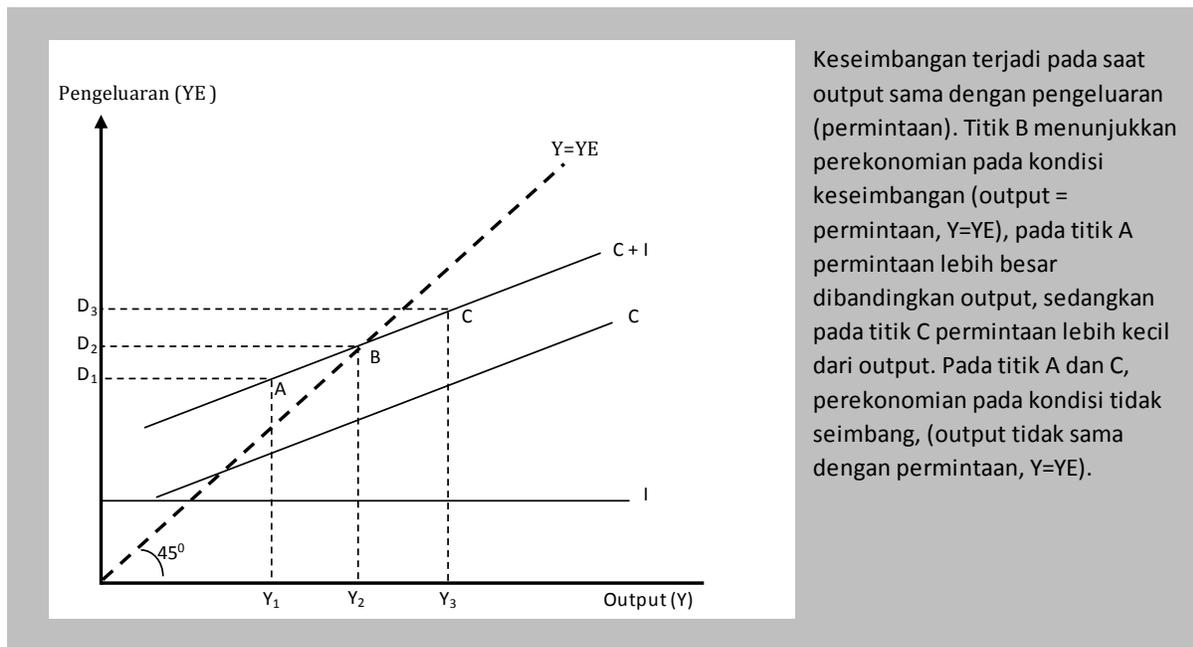
atau dapat ditulis dengan:

$$Y = \frac{1}{1-c} [\bar{C} + \bar{I}]$$

Formulasi tersebut berarti bahwa untuk keseimbangan dapat dicapai dengan merubah variabel \bar{C} dan juga variabel \bar{I} . Dengan kata lain keseimbangan dapat dicapai dengan merubah variabel konsumsi eksogen dan investasi eksogen. Secara grafis keseimbangan perekonomian sederhana (dua sektor digambarkan sebagai berikut).

Penjelasan Grafis

Berdasarkan dua grafik utama diatas (konsumsi dan investasi) keseimbangan perekonomian dapat ditentukan dengan cara menambahkan grafik konsumsi dan investasi. Hal hal perlu diperhatikan dalam menggabung dua grafik tersebut adalah posisi konsumsi pada saat pendapatan nol, kemiringan kurva kondumsi dan besarnya investasi.



Gambar 4.5 Keseimbangan perekonomian dua sektor dengan cara grafis.

Efek Pengganda (*Multiplier Effect*)

Poin penting pembahasan keseimbangan model pengeluaran (Keseimbangan silang Keynes) adalah adanya perubahan variabel eksogen terhadap variabel endogen. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan terjadi pada saat output sama dengan konsumsi dan investasi. Cermati lagi persamaan berikut.

$$Y = \frac{1}{1-c} [\bar{C} + \bar{I}]$$

Di mana Y adalah output \bar{C} dan \bar{I} adalah konsumsi dan investasi eksogen. Ekonomi makro sangat berkaitan dengan bagaimana dampak **perubahan** variabel eksogen terhadap **perubahan** variabel dependen. Misalkan perubahan variabel eksogen investasi diberi simbol $\Delta\bar{I}$, dan perubahan variabel dependen diberi simbol ΔY , dan variabel konsumsi eksogen dianggap tetap (*ceteris paribus*), \bar{C} , maka rumus di atas dapat ditulis menjadi.

$$\frac{\Delta Y}{\Delta\bar{I}} = \frac{1}{1-c}$$

Di sisi kiri, formulasi di atas berarti perubahan variabel investasi akan berpengaruh pada pendapatan nasional. Di sisi kanan formulasi tersebut berarti ada perubahan pada pola konsumsi secara otomatis hal ini karena perubahan pendapatan disposable (Y_d) berpengaruh terhadap perubahan konsumsi. Kondisi di mana perubahan variabel eksogen berpengaruh pada output dan juga konsumsi disebut dengan efek berganda (*multiplier effect*). Formulasi di atas menunjukkan upaya jangka pendek untuk mempengaruhi keseimbangan menuju keseimbangan agregat pengeluaran.

Angka pengganda ini sangat bermanfaat dalam menjelaskan adanya perubahan variabel eksogen terhadap output (baik masing-masing sektor maupun secara keseluruhan output). Contoh sederhana adalah bagaimana efek peningkatan investasi terhadap perubahan output?

Contoh-contoh Soal

1. Penentuan Keseimbangan

Misalkan sebuah perekonomian dengan fungsi konsumsi sebagai $C = 750 \text{ ribu} + 0.5Y_d$ dan besarnya investasi sebesar Rp 250 ribu. Dengan tanpa adanya campur tangan pemerintah, berapa besarnya keseimbangan perekonomian?.

Jawab

$$Y = C + I$$

$$Y = 750 + 0.5 Y_d + 250$$

Y_d sama dengan Y , sehingga

$$Y - 0,5Y = 1000$$

$$\frac{1}{2}Y = 1000$$

$$Y = 2000$$

Artinya perekonomian akan berada pada kondisi keseimbangan jika pendapatan nasional sebesar Rp 2000 ribu (2 juta).

2. Efek Variabel Eksogen pada Keseimbangan

Misalkan konsumsi masyarakat berbentuk fungsi $C = 500 \text{ ribu} + 0.75Y_d$ dan besarnya investasi sebesar Rp 250 ribu. Berapa besarnya GDP keseimbangan?

Jawab

$$Y = C + I$$

$$Y = 500 + 0.75 Y_d + 250$$

Y_d sama dengan Y , sehingga

$$Y - 0,75Y = 750$$

$$\frac{1}{4}Y = 750$$

$$Y = 3000$$

Keseimbangan baru sebesar Rp 3000 ribu (3 juta).

Istilah-Istilah Penting

- *Disposable income*
- Konsumsi
- Tabungan
- Investasi
- Kecenderungan untuk mengkonsumsi marginal -*marginal propensity to consume* (MPC)
- Kecenderungan konsumsi rata-rata-*average propensisty to consume* (APC)

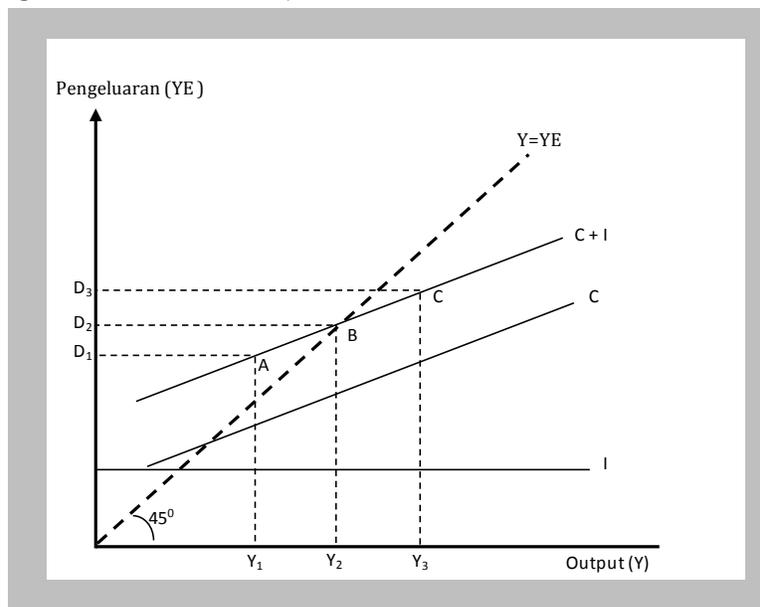
- Kecenderungan untuk menyimpan *marginal-marginal propensity to saving* (MPS)
- Angka pengganda (*multiplier effect*)
- Variabel eksogen
- Variabel endogen
- Output
- Permintaan (pengeluaran agregat)

Soal-soal Jawaban Pendek

1. Dalam perekonomian sederhana dua sektor, keseimbangan perekonomian pendekatan pengeluaran di susun dengan
2. Menurut Keynes konsumsi seseorang ditentukan oleh
3. Pendapatan yang siap dikonsumsi oleh individu disebut dengan.....
4. Investasi bersifatterhadap output.
5. Fungsi konsumsi $C = 750 + 0.75 Y_d$ artinya tanpa adanya pendapatan, konsumsi seseorang sebesar
6. Kecenderungan seseorang untuk mengkonsumsi barang disebut dengan
7. Kecenderungan seseorang untuk menyimpan barang disebut dengan
8. Nilai total kecenderungan untuk mengkonsumsi barang dan menyimpan barang sama dengan....
9. Dalam perekonomian dua sektor, fungsi konsumsi $C = 750 + 0.85 Y_d$ berarti bahwa besarnya simpanan seseorang sebesar
10. Angka pengganda investasi merupakan rasio perubahan investasi terhadap perubahan
11. Kondisi di mana output sama dengan pengeluaran disebut dengan

Soal Benar Salah

Gambar berikut digunakan untuk menjawab soal no 1 – 5.



1. Pada titik A permintaan lebih besar dari output, karenanya terjadi potensi inflasi.
2. Kurva I berbentuk garis landai berarti kurva tersebut bersifat eksogen terhadap output.
3. Pada kondisi B keseimbangan perekonomian tercapai karena permintaan sama dengan output.
4. Konsumsi tidak pernah dimulai dari titik 0 karena kecil kemungkinan orang tidak mengkonsumsi apapun meskipun tidak ada pendapatan.
5. Kecondongan kurva C tergantung dari keinginan seseorang untuk mengkonsumsi.
6. Saat $C = 500 + 0.75 Y_d$ dan $I = 500$ keseimbangan output bernilai Rp 4000 (4 juta).
7. Pada soal no.6 besarnya saving adalah Rp 500 ribu

Gunakan informasi dasar berikut untuk menjawab soal no.8 - 10

Misalkan $I = 100$, $C = 500 + 0.75 Y_d$; $Y_d = Y$,

8. Maka keseimbangan output sama dengan Rp 2400.
9. Jika terdapat peningkatan investasi sebesar Rp 20 ribu (total investasi menjadi 120), maka keseimbangan output sebesar Rp 2,480.
10. Efek pengganda investasi tersebut sebesar 4.

---000---

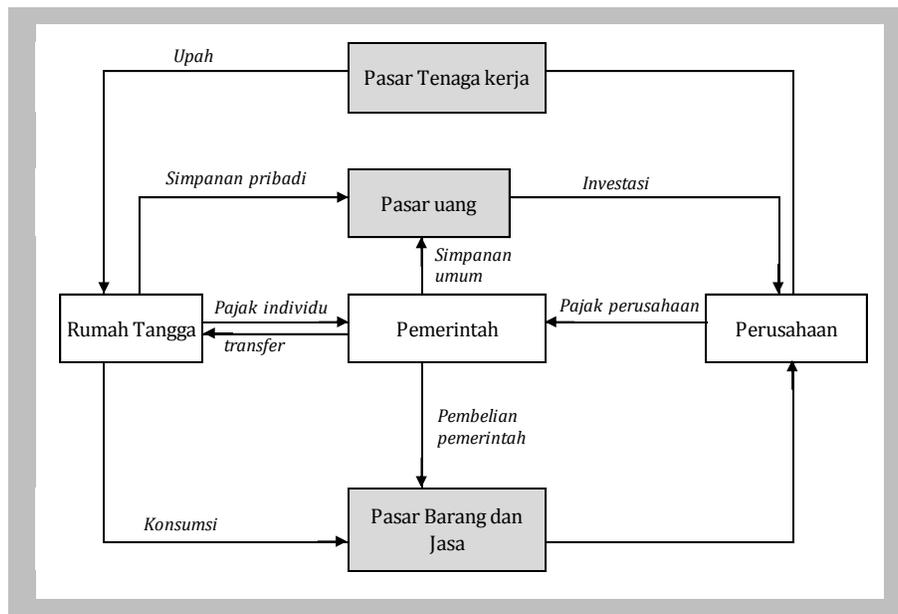
5. Model Keseimbangan Pengeluaran dengan Campur Tangan Pemerintah

Mengapa Anda Perlu Tahu

Kita tulis kembali krisis yang melanda Indonesia tahun 1997 sebagai momentum memasukkan peran pemerintah dalam kebijakan nasional. Saat itu pengangguran bertambah dan output nasional mengalami penurunan (lihat tabel 1.1 dan gambar 3.1). Pemerintah mengambil kebijakan jangka pendek dengan menjalankan proyek yang berbasis pemberdayaan masyarakat seperti pembuatan proyek-proyek yang menggunakan tenaga kerja manusia bukan mesin. Pertanyaannya bagaimana melogikan kebijakan pemerintah tersebut dalam teori ekonomi makro?

Perekonomian Tiga Sektor

Bab ini adalah materi kedua pembahasan keseimbangan perekonomian model Silang Keynes. Bab sebelumnya kita telah membahas perekonomian sederhana (dua sektor) yang menjadi dasar untuk perekonomian tiga sektor dan perekonomian terbuka. Poin penting di keseimbangan dua sektor adalah kecenderungan untuk mengkonsumsi (MPC) dan angka pengganda (*multiplier effect*). Selanjutnya, di perekonomian tiga sektor, terdapat variabel pengeluaran pemerintah yang menjadi fokus perekonomian.



Gambar 5.1 Diagram alir siklus perekonomian tertutup dengan peran pemerintah

Digaram alir di atas menggambarkan perekonomian yang lebih lengkap di mana kegiatan perekonomian dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga (C), perusahaan (I), dan pemerintah (G).

Siklus ekonomi

Adanya pengaruh pemerintah berpengaruh pada keseimbangan perekonomian. Pada perekonomian dua sektor keseimbangan terbentuk oleh dua sektor yaitu konsumsi I dan investasi (I). Dengan adanya peran pemerintah, maka keseimbangan terbentuk dengan menambahkan peran pemerintah dalam model keseimbangan. Karena adanya pemerintah tersebut, perekonomian menjadi lebih kompleks, karena rumah tangga harus membayar pajak ke pemerintah (bagi yang diwajibkan membayar). Sebagian rumah tangga lainnya diberikan bantuan (subsidi).

Rumah Tangga

- Rumah tangga mengkonsumsi barang yang diproduksi perusahaan.
- Rumah tangga menyimpan uang untuk investasi.
- Rumah tangga membayar **pajak** ke pemerintah.
- Rumah tangga menerima balas jasa atas factor produksi yang dimiliki (upah, suku bunga, keuntungan).

Perusahaan

- Perusahaan membayar factor produksi ke rumah tangga.
- Perusahaan membayar **pajak** ke pemerintah.

Pemerintah

- Pemerintah menerima pajak dari rumah tangga dan perusahaan.
- Pemerintah membeli barang dan jasa yang diproduksi perusahaan.
- Pemerintah melakukan transfer (subsidi) kepada rumah tangga.
- Pemerintah melakukan investasi keuangan.

Peran pemerintah

Peran pemerintah dalam berperan dalam perekonomian dapat berupa belanja pemerintah dan transfer. dengan instrumen yang dimilikinya yaitu dengan cara belanja pemerintah untuk gaji pegawai negeri dan juga belanja pemerintah seperti belanja barang untuk keperluan pemerintahan.

Pengeluaran pemerintah juga meliputi transfer yang dilakukan pada rumah tangga secara langsung baik dalam bentuk subsidi atau bantuan-bantuan (seperti program bantuan langsung tunai).

Adanya pajak yang dibebankan pemerintah ke rumah tangga menyebabkan pendapatan rumah tangga (Y_d) berkurang, sebaliknya transfer yang diberikan pemerintah ke rumah tangga menyebabkan pendapatan rumah tangga bertambah. Karenanya pendapatan rumah tangga berubah menjadi:

$$Y_d = Y - T_x + T_r \dots\dots\dots 5.1$$

Di mana Y_d = pendapatan rumah tangga sebelum dipotong pajak, Y adalah pendapatan nasional, T_x adalah pajak, dan T_r adalah transfer dari pemerintah.

Karena adanya pajak dan transfer dari pemerintah, maka konsumsi rumah tangga berubah menjadi

$$C = \bar{C} + cY_d$$

$$C = \bar{C} + c(Y - T_x + T_r) \dots\dots\dots 5.2$$

Artinya konsumsi merupakan fungsi dari konsumsi eksogen, pendapatan, pajak dan transfer.

Jenis-Jenis Pajak

Sebelum membahas keseimbangan pemerintahan dengan adanya pajak, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan pajak. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa pajak adalah pungutan pemerintah yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak (rumah tangga dan perusahaan) dengan tanpa adanya imbalan secara langsung kepada wajib pajak tersebut. Pajak tersebut digunakan untuk kebutuhan pembangunan.

Menurut besarnya pajak yang dibayarkan wajib pajak, besarnya pajak dapat digolongkan menjadi:

1. Pajak regresif. Artinya prosentase besarnya pajak mengalami penurunan dengan peningkatan tingkat pendapatan. Model ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas factor produksi. Artinya wajib pajak didorong untuk menghasilkan pendapatan (keuntungan) yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas minimal yang dibayarkan wajib pajak.
2. Pajak proporsional. Artinya prosentase besarnya pajak bersifat tetap tanpa melihat tingkat pendapatan. Sistem pengenaan ini tidak memandang siapa wajib pajak baik orang berpendapatan rendah maupun orang berpendapatan tinggi. Secara nominal, besarnya nilai pajak meningkat dengan meningkatnya pendapatan. Pajak ini biasanya dikenakan pada perusahaan.

3. Pajak Progresif. Pajak ini berarti pengenaan pajak berdasarkan pada besarnya pendapatan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi pendapatan wajib pajak, maka tingkat pajak yang dibayarkan juga lebih tinggi. Pajak ini lebih banyak diperuntukkan perekonomian

Besarnya pajak (baca: jenis pajak) yang dibayarkan oleh wajib pajak tersebut akan berpengaruh terhadap keseimbangan perekonomian nasional. Jika jenis pajak yang dianut adalah pajak proporsional yang besarnya sama untuk setiap pembayar pajak, maka besarnya pajak bersifat eksogen terhadap pendapatan rumah tangga. Sedangkan jika jenis pajak yang digunakan adalah pajak regresif dan progresif, maka akan sangat berpengaruh pada pola konsumsi rumah tangga.

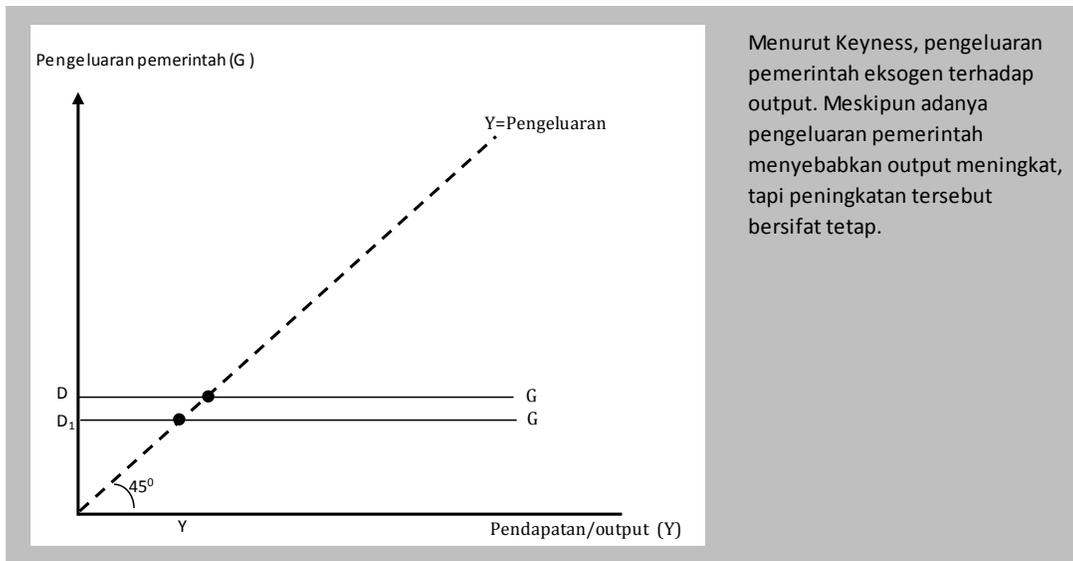
Keseimbangan Perekonomian Tertutup

Adanya pemerintah dalam perekonomian menyebabkan keseimbangan menjadi berubah. Tentunya output menjadi lebih besar pada perekonomian tiga sektor. Keseimbangan terjadi ketika output (Y) sama dengan agregat pengeluaran (YE). Bedanya, dalam perekonomian tiga sektor terdapat peran pemerintah. Dengan adanya peran pemerintah berpengaruh pada besarnya pengeluaran pemerintah itu sendiri dan juga besarnya pendapatan keluarga yang siap dibelanjakan (setelah dikurangi dengan pajak dan ditambah pendapatan yang diterima dari transfer pemerintah).

A. Keseimbangan Perekonomian Tertutup dengan Pajak Tetap (*Lump-sum tax*)

Pengeluaran Pemerintah dalam sebuah Grafis

Adanya pemerintah menyebabkan output menjadi bertambah. Pajak bersifat negative karena pajak mengurangi pendapatan rumah tangga. Transfer bersifat positif karena transfer meningkatkan pendapatan rumah tangga. Secara total adanya pengeluaran pemerintah meningkatkan output. Secara grafis dapat dilihat sebagai berikut.



Menurut Keynes, pengeluaran pemerintah eksogen terhadap output. Meskipun adanya pengeluaran pemerintah menyebabkan output meningkat, tapi peningkatan tersebut bersifat tetap.

Gambar 5.2 Peran pemerintah dalam perekonomian menurut Pendekatan Silang Keynes.

Selanjutnya bagaimana keseimbangan perekonomian? Pada bab 4 kita telah membahas keseimbangan perekonomian dua sektor di mana dalam perekonomian hanya ada rumah tangga dan perusahaan. Keseimbangan perekonomian tiga sektor (dengan adanya pemerintah) akan meningkatkan output. Lihat kembali gambar 5.2, karena dikurangi pajak, maka agregat pengeluaran lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Namun demikian pengeluaran pemerintah tetap positif.

Konsumsi dengan Pajak Tetap (Lump-sum tax)

Dengan asumsi bahwa pajak bersifat tetap untuk semua pembayar pajak (lump-sum), maka pajak disimbolkan dengan $\bar{T}x$

dan transfer juga sama untuk penerima transfer, maka transfer disimbolkan dengan $\bar{T}r$, maka fungsi formula konsumsi 5.2 menjadi

$$C = \bar{C} + c(Y - \bar{T}x + \bar{T}r) \dots\dots\dots 5.3$$

Dengan demikian konsumsi merupakan fungsi dari konsumsi eksogen, marginal propensity to consume, pendapatan, pajak dan transfer. Selanjutnya, konsumsi selalu berbanding terbalik dengan simpanan. Sehingga simpanan menjadi:

$$S = -\bar{C} + (1 - c)Yd$$

$$S = -\bar{C} + (1 - c)(Y - \bar{T}x + \bar{T}r)$$

Misalkan 1-c sama dengan s, maka

$$S = -\bar{C} + sY - s\bar{T}x + s\bar{T}r \dots\dots\dots 5.4$$

Berdasarkan formulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada perekonomian tiga sektor (adanya peran pemerintah) simpanan dipengaruhi oleh pendapatan, pajak, dan transfer dari pemerintah.

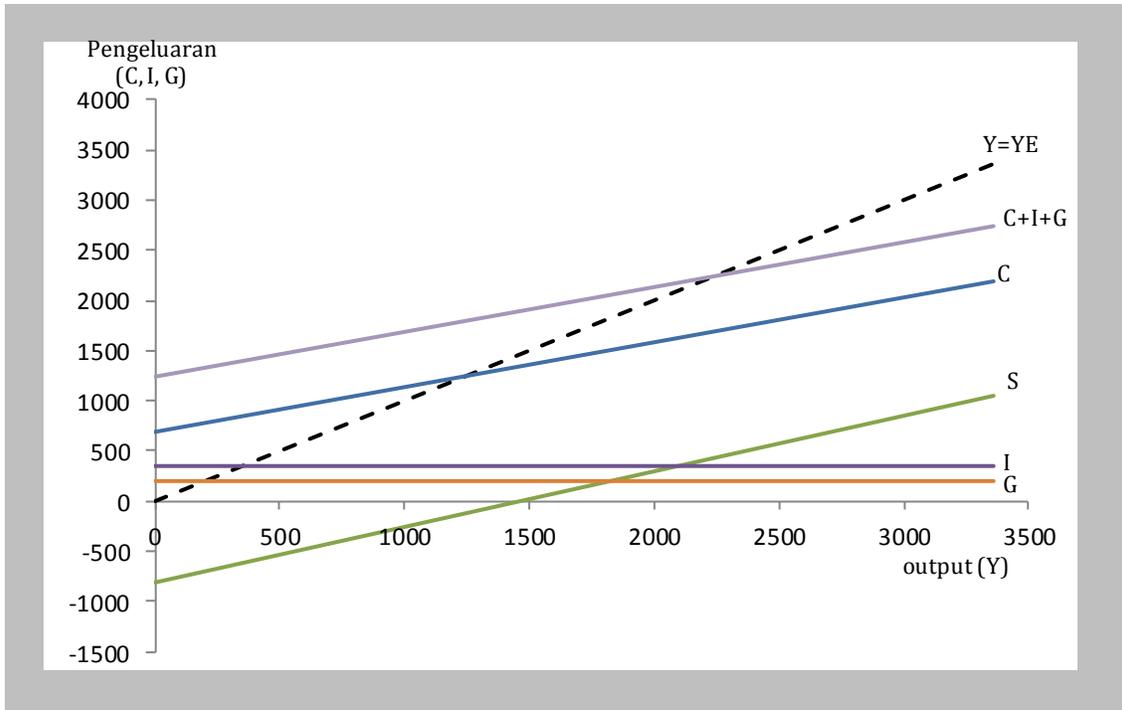
Ilustrasi

Misalkan Sebuah perekonomian memiliki masyarakat yang memiliki pola konsumsi seperti terlihat dalam tabel 5.1. Pola konsumsi tersebut terkait dengan pendapatan. Konsumsi tersebut juga sangat terkait dengan tabungan. Sedangkan investasi, pengeluaran pemerintah, pajak dan transfer pemerintah bersifat eksogen.

Tabel 5.1 Ilustrasi konsumsi, tabungan, pengeluaran pemerintah, pajak tetap, transfer, dan keseimbangan perekonomian.

Pendapatan	Konsumsi	Tabungan	Investasi	G	Tx	Tr	C + I + G
0	750	(750)	250	260	60	40	1,240
560	1,000	(440)	250	260	60	40	1,490
1,120	1,250	(130)	250	260	60	40	1,740
1,680	1,500	180	250	260	60	40	1,990
2,240	1,750	490	250	260	60	40	2,240
2,800	2,000	800	250	260	60	40	2,490
3,360	2,250	1,110	250	260	60	40	2,740

Pengeluaran agregat merupakan penambahan konsumsi (C), investasi (I), dan pengeluaran pemerintah (termasuk pajak dan transfer) seperti terlihat di kolom sebelah kanan tabel di atas. Dari tabel tersebut diketahui bahwa keseimbangan output dan pengeluaran agregat terjadi saat pendapatan sebesar Rp 2.240 ribu (2,2 juta). Pada perekonomian tiga sektor, konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan dikurangi dengan pajak dan ditambah dengan transfer. Jika dibuat dalam sebuah grafik, maka keseimbangan terdapat pada gambar berikut.



Gambar 5.3 Keseimbangan perekonomian tiga sektor (pajak bersifat tetap) secara grafis.

Investasi bersifat eksogen terhadap pendapatan, sehingga investasi disimbolkan dengan \bar{I} .

Pengeluaran pemerintah (G) bersifat eksogen terhadap pendapatan, sehingga pengeluaran pemerintah disimbolkan dengan \bar{G} .

$$Y = \bar{C} + c(Y - \bar{T}_x + \bar{T}_r) + \bar{I} + \bar{G}$$

$$Y - cY = \bar{C} + c(-\bar{T}_x + \bar{T}_r) + \bar{I} + \bar{G}$$

$$Y(1-c) = \bar{C} + c(-\bar{T}_x + \bar{T}_r) + \bar{I} + \bar{G}$$

$$Y = \frac{\bar{C} + c(-\bar{T}_x + \bar{T}_r) + \bar{I} + \bar{G}}{(1-c)}$$

Misalkan $(-\bar{T}x + \bar{T}r)$ disimbolkan dalam satu notasi yang menggambarkan pajak bersih, Tn , dan di mana pajak tersebut selalu lebih besar dibandingkan dengan transfer pemerintah, maka formulasi di atas menjadi:

$$Y = \frac{\bar{c} + c(-\bar{T}n) + \bar{I} + \bar{G}}{(1-c)}$$

dengan menata ulang, didapatkan:

$$Y = \frac{\bar{c} - c\bar{T}n + \bar{I} + \bar{G}}{(1-c)} \dots\dots\dots 5.5$$

Keseimbangan perekonomian tercapai jika output sama dengan konsumsi eksogen, pajak eksogen, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Dari keempat variabel tersebut, hanya pajak saja yang bernilai negative, sedangkan tiga lainnya bernilai positif.

Efek Pengganda (*Multiplier Effect*)

Dalam perekonomian dua sektor, di mana hanya rumah tangga dan investasi dalam sebuah perekonomian, kita mengenal angka pengganda konsumsi dan angka pengganda investasi. Selanjutnya, dalam perekonomian tiga sektor kita mengenal tambahan angka angka pengganda lain yang terkait yaitu pengganda pengeluaran pemerintah, pengganda pajak bersih, dan pengganda keseimbangan. Perlu diingat di sini bahwa pajak adalah bersifat *lump-sum* (tidak terpengaruh besarnya pendapatan).

Kerangka dasar angka pengganda adalah perubahan variabel eksogen terhadap variabel dependen. Dalam kerangka praktis, jika perekonomian berada dalam kondisi tidak seimbang, apa yang dapat dilakukan oleh perekonomian? Atau dengan cakupan yang lebih luas, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan nasional? Secara umum dapat ditulis secara matematis dengan.

$$\Delta Y = \frac{\Delta\bar{c} - c\Delta\bar{T}n + \Delta\bar{I} + \Delta\bar{G}}{(1-c)} \dots\dots\dots 5.6$$

Angka Pengganda pengeluaran pemerintah

Pada saat menghitung pengganda pemerintah, maka kita mengasumsikan bahwa yang mengalami perubahan adalah pengeluaran pemerintah, sedangkan variabel eksogen lainnya bersifat tetap, *ceteris paribus*. Sehingga pengganda pengeluaran pemerintah dapat ditulis dengan.

$$\Delta Y = \frac{\Delta\bar{G}}{(1-c)}$$

$\frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{(1-c)}$ jika $\frac{\Delta Y}{\Delta G}$ disimbolkan dengan k_e , maka pengganda pengeluaran pemerintah menjadi

$$k_e = \frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{(1-c)}, \dots\dots\dots 5.7$$

Formula ini sama dengan pengganda investasi, namun peubahnya (variabel eksogennya) berbeda.

Angka pengganda pajak netto lump-sum

Pengganda pajak lump-sum merupakan rasio perubahan pendapatan akibat adanya perubahan pajak. Dalam hal ini, pajak yang digunakan adalah pajak bersih. Kita lihat kembali formula 5.6 (dengan asumsi variabel bersifat tetap), maka pengganda pajak adalah sebagai berikut.

$$\Delta Y = \frac{-c\Delta T_n}{(1-c)}$$

$\frac{\Delta Y}{\Delta T_n} = \frac{-c}{(1-c)}$ jika $\frac{\Delta Y}{\Delta T_n}$ disimbolkan dengan k_t , maka pengganda pajak lump-sum dapat dituliskan dengan

$$k_t = \frac{-c}{(1-c)} \dots\dots\dots 5.8$$

Artinya pengganda pajak lump-sum merupakan rasio antara kecenderungan untuk mengkonsumsi (c), dan rasio kecenderungan untuk menyimpan. Tanda negative berarti peningkatan pajak akan menurunkan pendapatan melalui penurunan konsumsi.

Pengganda Jika pengeluaran pemerintah sama dengan pajak lump-sum

Jika pembelian pemerintah sama dengan pajak bersih, $G = T_n$; bagaimana angka penggandanya?. Kembali lagi ke formulasi 5.6 . Jika perubahan variabel $G, \overline{\Delta G}$, perubahan variabel $T_n, \Delta \overline{T_n}$, maka formulasi 5.6 menjadi

$$\Delta Y = \frac{\overline{\Delta C} - c\Delta \overline{T_n} + \Delta \overline{I} + \Delta \overline{G}}{(1-c)}$$

Jika perubahan pembelian pemerintah $\Delta \bar{G}$ sama dengan pajak *lump-sum*, $\Delta \bar{T}_n$, maka angka pengganda menjadi

$$\Delta Y = \frac{-c\Delta \bar{G} + \Delta \bar{G}}{(1-c)}$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta \bar{G}(1-c)}{(1-c)}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta \bar{G}} = \frac{(1-c)}{(1-c)}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta \bar{G}} = 1$$

Jika $\frac{\Delta Y}{\Delta \bar{G}}$ disimbolkan k_b (pengganda pada saat $\Delta G = \Delta T_n$), maka angka pengganda tersebut menjadi

$$\frac{\Delta Y}{\Delta \bar{G}} = k_b = 1$$

Artinya jika besarnya perubahan pembelian pemerintah sama dengan perubahan pajak bersih, maka angka pengganda menjadi satu.

Contoh-contoh Soal

Gunakan informasi berikut untuk menjawab soal no.1 – no.6

Misalkan sebuah perekonomian dengan fungsi konsumsi $C = Rp\ 600 + 0,8 Y_d$; pengeluaran pemerintah sebesar Rp 200; $Y_d = Y - \bar{T}_x + \bar{T}_r$ dengan pajak (\bar{T}_x) sebesar Rp 100 dan transfer (\bar{T}_r) sebesar Rp 40; investasi sebesar Rp 350. (semua satuan dalam ribu).

Tentukan

1. Keseimbangan perekonomian dengan peran pemerintah
2. Konsumsi pada saat keseimbangan
3. Simpanan pada saat keseimbangan
4. Misalkan pajak pada perekonomian ditingkatkan sebesar Rp 20 (menjadi Rp120), bagaimana keseimbangan perekonomian
5. Misalkan pengeluaran pemerintah pada perekonomian ditingkatkan sebesar Rp 20 (menjadi Rp120), bagaimana keseimbangan perekonomian
6. Misalkan transfer pada perekonomian ditingkatkan sebesar Rp 20 (menjadi Rp 60), bagaimana
7. Simpulkan hasil dari no.4 dan no.5.
8. Simpulkan hasil dari no. 4 dan no.6.

Jawab

Syarat keseimbangan saat ada peran pemerintah.

$$Y = YE$$

1. $Y = C + I + G$

$$Y = 600 + 0.8 (Y - \bar{T}_x + \bar{T}_r) + 350 + 200$$

$$Y = 600 + 0.8 (Y - 100 + 40) + 350 + 200$$

$$Y = 600 + 0.8 (Y - 60) + 350 + 200$$

$$Y = 600 + 0.8 Y - 48 + 350 + 200$$

$$Y = 600 + 0.8 Y + 502$$

$$Y - 0.8Y = 1,102$$

$$0,2Y = 1,102$$

$$Y = 5,510$$

2. $C = Rp 600 + 0,8 Y_d$

$$C = Rp 600 + 0,8 (5,510 - 100 + 40)$$

$$C = Rp 600 + 0,8 (5,450)$$

$$C = Rp 600 + 4,360$$

$$C = Rp 4,960$$

3. $S = -\bar{C} + sY - s\bar{T}_x + s\bar{T}_r$

$$S = -4960 + 0,2(5510) - 0,2(100) + 0,2(40)$$

$$S = -4960 + 1102 - 20 + 8$$

$$S = 490$$

Cara lain untuk menentukan tabungan (saving)

$$Y = C + S$$

$$S = Y - C$$

$$S = Y - C - T_x + T_r$$

$$S = 5510 - 4960 - 100 + 40$$

$$S = 5510 - 5020$$

$$S = 490$$

4. Pajak dinaikkan Rp 20

$$Y = C + I + G$$

$$Y = 600 + 0.8 (Y - \bar{T}_x + \bar{T}_r) + 350 + 200$$

$$Y = 600 + 0.8 (Y - 120 + 40) + 350 + 200$$

$$Y = 600 + 0.8 (Y - 80) + 350 + 200$$

$$Y = 600 + 0.8 Y - 64 + 350 + 200$$

$$Y = 600 + 0.8 Y + 486$$

$$Y - 0.8Y = 1,086$$

$$0,2Y = 1,086$$

$$Y = 5,430$$

5. Jika pengeluaran pemerintah diturunkan Rp 20 (menjadi Rp 330)

$$Y = C + I + G$$

$$Y = 600 + 0.8 (Y - \bar{T}_x + \bar{T}_r) + 330 + 200$$

$$Y = 600 + 0.8 (Y - 100 + 40) + 330 + 200$$

$$Y = 600 + 0.8 (Y - 80) + 330 + 200$$

$$Y = 600 + 0.8 Y - 64 + 330 + 200$$

$$Y = 600 + 0.8 Y + 486$$

$$Y - 0.8Y = 1,082$$

$$0,2Y = 1,082$$

$$Y = 5,410$$

6. Jika transfer pemerintah diturunkan Rp 20 (menjadi Rp 20)

$$Y = 600 + 0.8 (Y - \bar{T}_x + \bar{T}_r) + 350 + 200$$

$$Y = 600 + 0.8 (Y - 100 + 20) + 350 + 200$$

$$Y = 600 + 0.8 (Y - 80) + 350 + 200$$

$$Y = 600 + 0.8 Y - 64 + 350 + 200$$

$$Y = 600 + 0.8 Y + 486$$

$$Y - 0.8Y = 1,086$$

$$0,2Y = 1,086$$

$$Y = 5,430$$

7. Dari no.4 dan no.5 dapat disimpulkan bahwa peningkatan pajak Rp 20 memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan pengeluaran pemerintah Rp 20.

8. Dari no.4 dan no.6 dapat disimpulkan bahwa peningkatan pajak Rp 20 dan penurunan transfer pemerintah sebesar Rp 20 memiliki dampak yang sama terhadap perekonomian.

Gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan no.9 - 10

Misalkan output pada tenaga kerja penuh terjadi saat Rp 800, output keseimbangan saat ini sebesar Rp 600 dan *marginal propensity to consume* (MPC) sebesar 0,6.

9. Bagaimana perubahan pengeluaran pemerintah

10. Bagaimana perubahan pajak

Jawab

9. Perubahan pengeluaran pemerintah

$$\Delta Y = \frac{\Delta \bar{G}}{(1-c)}$$

Agar output keseimbangan saat ini sama dengan output tenaga kerja penuh maka perlu ditambah Rp 200.

Berdasarkan informasi dari MPC sebesar 0,60, maka angka pengganda pengeluaran pemerintah sebesar $= \frac{1}{(1-0,60)}$ sama dengan 2,5.

$$\frac{\Delta Y}{\Delta \bar{G}} = 2,5$$

$$\frac{200}{\Delta \bar{G}} = 2,5$$

$$\Delta \bar{G} = 80,$$

Artinya hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan output sebesar 100, maka pengeluaran pemerintah perlu ditambah sebesar Rp 40.

10. Perubahan pajak

Buka kembali rumus angka pengganda pajak lump-sum

$$k_t = \frac{-c}{(1-c)}$$

$$k_t = \frac{-0,6}{(1-0,6)} = -1,5$$

$$\frac{200}{\Delta \bar{Tn}} = -1,5$$

$$\Delta \bar{Tn} = -133$$

Untuk meningkatkan meningkatkan pendapatan sebesar Rp 200, maka pajak lump sump perlu diturunkan sebesar Rp 133.

Istilah-Istilah Penting

- Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*)
- Pajak lump-sum (*lump-sum tax*)
- Pajak regresif (*regressive tax*)
- Pajak proporsional (*proporsional tax*)

- Pajak progresif (*progressive tax*)
- Keseimbangan tiga sektor
- Angka pengganda pemerintah (*government multiplier*)
- Angka pengganda pajak bersih (*tax multiplier*)
- Transfer pemerintah (*government transfer*)

Soal-soal Jawaban Pendek

1. Dalam perekonomian tiga sektor, keseimbangan perekonomian ditentukan oleh
2. Pemerintah mengeluarkan keuangan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat golongan ekonomi lemah. Pengeluaran pemerintah tersebut dikenal dengan
3. Pajak yang nilai nominalnya tetap (tidak tergantung pendapatan) disebut dengan
4. Pajak yang besarnya proporsional dengan pendapatan disebut dengan
5. Pajak yang besarnya menurun dengan meningkatnya pendapatan disebut dengan.....
6. Misalkan angka pengganda pemerintah sebesar 5, artinya
7. Misalkan angka pengganda pajak lump sum bersih sebesar 2, artinya....

Soal Benar Salah

Gunakan informasi berikut untuk menjawab soal no.1 hingga 3.

Misalkan sebuah perekonomian memiliki fungsi konsumsi sebesar $C = Rp\ 600 + 0,7\ Y_d$; pengeluaran pemerintah sebesar Rp 100; Investasi sebesar Rp 200; $Y_d = Y - \bar{T}_x + \bar{T}_r$ dengan pajak (\bar{T}_x) sebesar Rp 100 dan transfer (\bar{T}_r) sebesar Rp 20. (semua satuan dalam ribu).

Maka

1. Besarnya output keseimbangan sebesar Rp 2400
2. Besarnya konsumsi keseimbangan sebesar Rp 1624
3. Besarnya simpanan keseimbangan sebesar Rp 776

Gunakan informasi berikut untuk menjawab soal 4-5

Misalkan output pada tenaga kerja penuh terjadi saat Rp 1000, output keseimbangan saat ini sebesar Rp 1300 dan *marginal propensity to consume* (MPC) sebesar 0,8.

Maka

4. Pengeluaran pemerintah perlu dikurangi Rp 300
5. Perubahan pajak perlu ditambah Rp 200

B. Keseimbangan Perekonomian Tertutup dengan Pajak Pendapatan yang terpengaruh (Built-in Tax)

Pembahasan keseimbangan perekonomian tertutup dengan pajak tetap mengasumsikan bahwa besarnya pajak tidak tergantung pada pendapatan seseorang. Artinya berapapun pendapatan rumah tangga seseorang pajaknya adalah sama. Hal ini seringkali berbeda dengan sistem perpajakan yang dianut negara-negara saat ini (pajak progressive dan pajak proporsional). Indonesia menerapkan sistem pengenaan pajak yang bersifat progresif. Artinya semakin tinggi pendapatan, maka besarnya persentase pajak yang harus dibayarkan juga tinggi.

Pengenaan pajak ini akan berpengaruh pada pendapatan dan konsumsi rumah tangga. Pada pembahasan sebelumnya, konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan disposabel. Sedangkan pendapatan dikenai pajak yang besarnya sama, seperti yang ditunjukkan dalam formulasi 5.3 diatas.

$$C = \bar{C} + c(Y - \bar{T}x + \bar{T}r)$$

Selanjutnya, jika pajak yang dipakai adalah pajak proporsional, maka akan berpengaruh pada pendapatan. Secara mendasar, fungsi pajak proporsional adalah sebagai berikut.

$$T = \bar{T}x + tY$$

Di mana T adalah besarnya pajak, Tx adalah besarnya pajak saat pendapatan nol, dan t adalah besarnya pajak proporsional, Y adalah pendapatan nasional. Dengan adanya pajak proporsional tersebut, fungsi konsumsi menjadi:

$$C = \bar{C} + c(Y - (\bar{T}x + tY) + \bar{T}r)$$

$$C = \bar{C} + c(Y - \bar{T}x - tY + \bar{T}r)$$

Jika fungsi pajak dan transfer dimisalkan dengan pajak bersih, $\bar{T}n$ dan pajak lebih besar dibandingkan transfer (sehingga $\bar{T}n$ bernilai negative), maka fungsi konsumsi menjadi:

$$C = \bar{C} + c(Y - \bar{T}n - tY)$$

Dengan adanya pajak proporsional, maka fungsi konsumsi merupakan konsumsi eksogen dan konsumsi yang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang dipengaruhi oleh pajak.

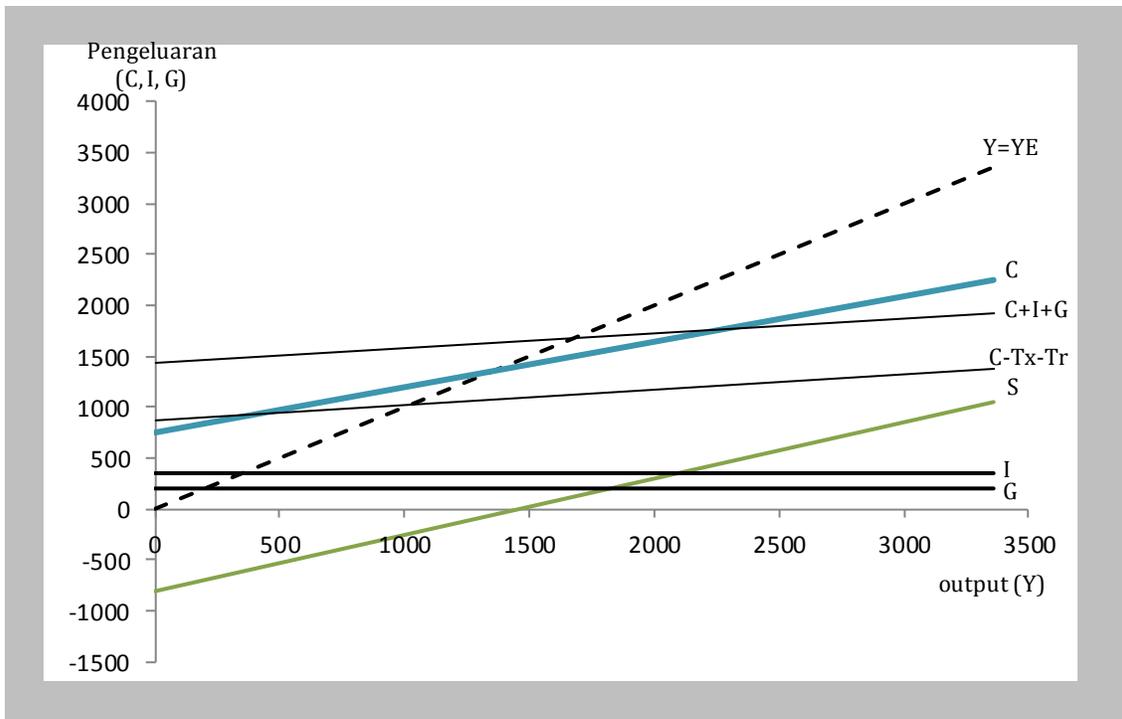
Ilustrasi

Misalkan sebuah perekonomian memiliki pola konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan pajak seperti dalam tabel 5.2.

Tabel 5.2 Ilustrasi konsumsi, tabungan, pengeluaran pemerintah, pajak yang besarnya tergantung pendapatan, transfer, dan keseimbangan perekonomian (satu ribu rupiah).

Pendapatan	Konsumsi	Tabungan	Investasi	G	Tx	Tr	C-Tx+Tr	C + I + G
0	750	(710)	350	200	0	40	790	1,340
560	1,000	(456)	350	200	56	40	984	1,534
1,120	1,250	(258)	350	200	168	40	1,122	1,672
1,680	1,500	(190)	350	200	410	40	1,130	1,680
2,240	1,750	(17)	350	200	547	40	1,243	1,793
2,800	2,000	157	350	200	683	40	1,357	1,907
3,360	2,250	142	350	200	1,008	40	1,282	1,832

Perhatikan kolom pendapatan dan Tx. Saat pendapatan 0, besarnya pajak adalah nol. Saat pendapatan Rp 560, pajaknya sebesar 56 (10%). Selanjutnya, saat pendapatan Rp 1120, pajaknya sebesar Rp 168 (15%); dan seterusnya. Besarnya persentase pajak meningkat dengan meningkatnya pendapatan. Selanjutnya, keseimbangan perekonomian terjadi saat besarnya pendapatan sebesar Rp 1,680 pada saat itu saving sama dengan -190. Hal ini bisa saja terjadi karena investasi sektor swasta rendah, atau pengeluaran pemerintah masih kurang. Secara grafis, keseimbangan dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 5.3 Keseimbangan perekonomian tiga sektor (pajak bersifat proporsional/regressif) secara grafis.

Beberapa hal penting terkait adanya pajak terhadap keseimbangan.

1. Pajak akan mengurangi pendapatan seseorang, sehingga dengan adanya pajak, maka konsumsi seseorang akan berkurang. Perhatikan gambar 5.3 di atas, setelah pendapatan dikenai pajak ($C-Tx-Tr$), maka konsumsi lebih kecil dibandingkan sebelumnya (C).
2. Kemiringan fungsi konsumsi setelah adanya pajak lebih landai dibandingkan dengan sebelum adanya pajak. Hal ini dikarenakan setelah adanya pajak pendapatan disposabel lebih kecil (tentu beda orang beda pola konsumsi).

Selain pendekatan grafis, keseimbangan perekonomian tiga sektor (dengan adanya pajak) dapat diformulasikan secara matematis sebagai berikut.

$$Y = C + I + G$$

$$Y = \bar{C} + c(Y - \bar{T}x - tY + \bar{T}r) + \bar{I} + \bar{G}$$

$$Y = \bar{C} + cY - c\bar{T}x - ctY + c\bar{T}r + \bar{I} + \bar{G}$$

$$Y - cY + ctY = \bar{C} - c\bar{T}x + c\bar{T}r + \bar{I} + \bar{G}$$

$$Y(1 - c + ct) = \bar{C} - c\bar{T}x + c\bar{T}r + \bar{I} + \bar{G}$$

$$Y = \frac{\bar{C} - c\bar{T}x + c\bar{T}r + \bar{I} + \bar{G}}{(1 - c + ct)} \dots\dots\dots 5.9$$

Misalkan $-\bar{T}x + \bar{T}r$ disimbolkan dengan notasi $-\bar{T}n$ pajak bersih (tanda negative berarti pajak lebih besar dengan transfer pemerintah), maka formulasi di atas dapat dituliskan dengan

$$Y = \frac{\bar{C} - c\bar{T}n + \bar{I} + \bar{G}}{(1 - c + ct)} \dots\dots\dots 5.10$$

Artinya, keseimbangan perekonomian konsumsi rumah tangga, investasi swasta, pengeluaran pemerintah di mana tingkat konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pajak. Ditekankan kembali bahwa hal yang membedakan dengan perekonomian dengan asumsi pajak tetap adalah pada tingkat konsumsi yang dipengaruhi oleh pajak. Perhatikan formula 5.5 yang tulis kembali berikut.

$$Y = \frac{\bar{C} - c\bar{T}n + \bar{I} + \bar{G}}{(1 - c)}$$

Perhatikan formula 5.10 dan 5.5 di atas khususnya pada faktor pembagi di mana pada formula 5.10 adalah $(1 - c + ct)$, sedangkan pada formula 5.5 adalah $(1 - c)$. Tanda positif pada ct menunjukkan bahwa pembagi akan semakin besar, artinya dengan adanya pajak yang semakin besar (tentu dengan batasan tertentu), maka perekonomian akan semakin kecil.

Efek Pengganda (*Multiplier Effect*)

Karena besarnya pajak yang dipengaruhi oleh pendapatan, maka angka penggandanya juga berbeda dengan pajak yang besarnya tetap. Perlu ditekankan kembali bahwa angka pengganda diartikan dengan perubahan variabel dependen (pendapatan nasional) dengan adanya perubahan variabel eksogen (konsumsi, investasi, peran pemerintah). Di mana peran pemerintah dapat berpengaruh pada konsumsi rumah tangga melalui mekanisme perubahan besarnya pajak.

Misalkan perubahan pendapatan nasional disimbolkan dengan $\Delta\bar{Y}$, sedangkan perubahan variabel eksogen masing-masing disimbolkan dengan $\Delta\bar{C}$, $\Delta\bar{T}n$, $\Delta\bar{I}$, $\Delta\bar{G}$, maka perubahan pendapatan nasional akibat perubahan variabel eksogen dapat ditulis dengan.

$$\Delta Y = \frac{\Delta\bar{C} - c\Delta\bar{T}n + \Delta\bar{I} + \Delta\bar{G}}{(1 - c + ct)} \dots\dots\dots 5.11$$

Dari formulasi di atas dapat diketahui masing-masing angka pengganda seperti angka pengganda konsumsi, investasi, pengganda pajak, dan pengganda pengeluaran pemerintah. Karena kita lebih berkonsentrasi pada peran pemerintah dalam perekonomian, maka pembahasan ditekankan pada pajak dan peran pemerintah.

Angka Pengganda pengeluaran pemerintah

Pada saat menghitung pengganda pemerintah, maka kita mengasumsikan bahwa yang mengalami perubahan adalah pengeluaran pemerintah, sehingga perubahan pengeluaran pemerintah disimbolkan dengan $\overline{\Delta G}$, sedangkan variabel eksogen lainnya bersifat tetap, *ceteris paribus*. Sehingga pengganda pengeluaran pemerintah dapat ditulis dengan.

$$\Delta Y = \frac{\Delta \overline{G}}{(1-c+ct)}$$

$\frac{\Delta Y}{\Delta \overline{G}} = \frac{1}{(1-c+ct)}$ jika $\frac{\Delta Y}{\Delta \overline{G}}$ disimbolkan dengan k_e , maka pengganda pengeluaran pemerintah menjadi

$$k_e = \frac{\Delta Y}{\Delta \overline{G}} = \frac{1}{(1-c+ct)}, \dots\dots\dots 5.12$$

Artinya perubahan pengeluaran pemerintah dapat berpengaruh pada perubahan pendapatan nasional dengan mekanisme perubahan konsumsi rumah tangga yang dipengaruhi oleh pajak.

Angka pengganda pajak netto terpengaruh

Pengganda pajak terpengaruh merupakan rasio perubahan pendapatan nasional akibat adanya perubahan pajak proporsional. Dalam hal ini, pajak yang digunakan adalah pajak bersih. Dengan asumsi variabel lain bersifat tetap, maka pengganda pajak proporsional adalah sebagai berikut.

$$\Delta Y = \frac{-c \Delta \overline{T_n}}{(1-c+ct)}$$

$\frac{\Delta Y}{\Delta \overline{T_n}} = \frac{-c}{(1-c+ct)}$ jika $\frac{\Delta Y}{\Delta \overline{T_n}}$ disimbolkan dengan k_{tp} , maka pengganda pajak proporsional dapat dituliskan dengan

$$k_{tp} = \frac{-c}{(1-c+ct)} \dots\dots\dots 5.13$$

Artinya pengganda pajak proporsional merupakan rasio antara kecenderungan untuk mengkonsumsi (c), dan rasio kecenderungan untuk menyimpan ditambah kecenderungan mengkonsumsi dengan pajak proporsional. Tanda negative berarti peningkatan pajak akan menurunkan pendapatan melalui penurunan konsumsi.

Pengganda Jika pembelian pemerintah sama dengan pajak terpengaruh

Misalkan dalam suatu kondisi pembelian pemerintah sama dengan pajak proporsional bersih, $G = T_n$; bagaimana angka penggandanya?. Jika perubahan pembelian pemerintah, $\Delta \bar{G}$, perubahan pajak proporsional T_n , $\Delta \bar{T}_n$, maka angka pengganda menjadi

$$\Delta Y = \frac{-c\Delta \bar{G} + \Delta \bar{G}}{(1-c+ct)}$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta \bar{G}(1-c)}{(1-c+ct)}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta \bar{G}} = \frac{(1-c)}{(1-c+ct)}$$

Jika $\frac{\Delta Y}{\Delta \bar{G}}$ disimbolkan k_b (pengganda pada saat $\Delta G = \Delta T_n$), maka angka pengganda tersebut menjadi

$$\frac{\Delta Y}{\Delta \bar{G}} = k_b = \frac{(1-c)}{(1-c+ct)}$$

angka pengganda ini lebih kecil jika dibandingkan dengan dibandingkan saat pajak lump-sum, $\frac{\Delta Y}{\Delta \bar{G}} = \frac{(1-c)}{(1-c)}$. Hal ini membuktikan bahwa dengan dikenai pajak proporsional, maka berdampak pada perekonomian yang lebih cenderung mengecil.

Contoh Soal

Gunakan informasi berikut untuk menjawab soal no.1 – no.4

Misalkan fungsi konsumsi = $200 + 0,75Y_d$, $I = 100$, $G = 150$, $T_r = 20$, dan pajak proporsional sebesar 0,1 Y.

1. Tentukan keseimbangan output!
2. Berapa besarnya penerimaan pajak pada saat keseimbangan! Jelaskan kondisi keseimbangan keuangan!
3. Tentukan keseimbangan output ketika terjadi peningkatan investasi dari 100 ke 150!
4. Bagaimana kondisi pajak dengan naiknya investasi tersebut!

Jawab

Syarat keseimbangan adalah $Y = Y_E$

1. $Y = YE$

$$Y = C + I + G$$

$$Y = 200 + 0,75Y_d + 100 + 150$$

$$Y = 200 + 0,75(Y - T_x + T_r) + 100 + 150$$

$$Y = 200 + 0,75(Y - 0,1Y + 20) + 250$$

$$Y = 200 + 0,75Y - 0,075Y + 20 + 250$$

$$Y = 200 + 0,675Y + 270$$

$$0,325Y = 470$$

$$Y = 1446,15$$

2. Besarnya pajak pada saat keseimbangan sebesar $T_x = 0,1Y$

$$T_x = 0,1(1446,15)$$

$$T_x = 144,6$$

Pengeluaran pemerintah sebesar Rp 150, sedangkan pajak yang didapatkan sebesar Rp 144,6; maka keseimbangan anggaran mengalami surplus sebesar Rp 5,4 ($150 - 144,6$).

3. Hitung keseimbangan perekonomian terbaru dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah.

$$Y = C + I + G$$

$$Y = 200 + 0,75Y_d + 150 + 150$$

$$Y = 200 + 0,75(Y - T_x + T_r) + 150 + 150$$

$$Y = 200 + 0,75(Y - 0,1Y + 20) + 300$$

$$Y = 200 + 0,75Y - 0,075Y + 20 + 300$$

$$Y = 200 + 0,675Y + 320$$

$$0,325Y = 520$$

$$Y = 1600$$

Pajak dengan keseimbangan perekonomian yang baru adalah

$$T_x = 0,1Y$$

$$T_x = 0,1(1600)$$

$$T_x = 160$$

Dengan adanya tambahan investasi pajak yang dibayarkan sebesar Rp 160; artinya terjadi peningkatan pajak yang dikeluarkan; sehingga keseimbangan pendanaan berkurang sebesar Rp 10 ($150 - 160$).

4. Pajak mengalami kenaikan dengan naiknya perekonomian. Hal ini dikarenakan pajak yang dikenakan adalah pajak proporsional.

Gunakan informasi berikut untuk menjawab soal 5 – 7.

Misalkan *marginal propensity to consume* adalah 0,8 dan pajak tidak terpengaruh oleh pendapatan. Bagaimana kondisi keseimbangan output untuk

5. Perubahan variabel pengeluaran pemerintah sebesar Rp15,
6. Peningkatan pajak sebesar Rp 20
7. Transfer pemerintah berkurang sebesar Rp 10

Untuk menjawab pertanyaan tersebut (apakah terjadi kenaikan atau penurunan keseimbangan perekonomian) digunakan konsep angka pengganda yang sama dengan perubahan pendapatan dibagi dengan perubahan (kenaikan atau penurunan) yang disimbolkan dengan Δ .

Jawab

Perlu diingat bahwa dalam soal tersebut pajak tidak dipengaruhi oleh pendapatan.

5. Pengganda pengeluaran pemerintah

$$k_e = \frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{(1-c)}, \text{ sehingga}$$

$$\frac{\Delta Y}{15} = \frac{1}{(1-0,8)}$$

$$\frac{\Delta Y}{15} = 5$$

$$\Delta Y = 75$$

Artinya dengan kenaikan pengeluaran pemerintah, maka perekonomian meningkat sebesar Rp 75.

6. Pengganda pajak lump-sum netto

Karena hanya pajak yang berubah maka transfer dianggap nol.

$$k_t = \frac{\Delta Y}{\Delta T_n} = \frac{-c}{(1-c)}$$

$$\frac{\Delta Y}{20} = \frac{-0,8}{(1-0,8)}$$

$$\frac{\Delta Y}{20} = -4$$

$$\Delta Y = -80$$

Adanya peningkatan pajak akan menurunkan pendapatan sebesar Rp 80.

7. Pengganda pajak lump-sum netto

Karena hanya transfer yang berubah, maka pajak dianggap tetap, sehingga

$$kt = \frac{\Delta Y}{\Delta T_n} = \frac{-c}{(1-c)}$$

$$\frac{\Delta Y}{20} = \frac{-0,8}{(1-0,8)}$$

$$\frac{\Delta Y}{-10} = -4$$

$$\Delta Y = 40$$

Adanya pengurangan transfer pemerintah akan meningkatkan pendapatan sebesar Rp 40.

Gunakan informasi berikut untuk menjawab soal no.8-11

Misalkan *marginal propensity to consume* adalah 0,8 dan fungsi pajak adalah 0.2Y. Bagaimana kondisi keseimbangan output untuk

8. Perubahan variabel pengeluaran pemerintah sebesar Rp15,
9. Peningkatan pajak sebesar Rp 20
10. Transfer pemerintah berkurang sebesar Rp 10
11. Bandingkan hasil perhitungan no.8 dan no.5 di atas

Jawab

Perlu diingat bahwa dalam soal tersebut pajak dipengaruhi oleh pendapatan.

8. Pengganda pengeluaran pemerintah

$$k_e = \frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{(1-c+ct)}, \text{ sehingga}$$

$$\frac{\Delta Y}{15} = \frac{1}{(1-0,8+(0,8 \times 0,2))}$$

$$\frac{\Delta Y}{15} = \frac{1}{(1-0,8+(0,8 \times 0,2))}$$

$$\frac{\Delta Y}{15} = \frac{1}{0,4}$$

$$\frac{\Delta Y}{15} = 2,5$$

$$\Delta Y = 37,5$$

Artinya dengan kenaikan pengeluaran pemerintah, maka perekonomian meningkat sebesar Rp 37,5.

9. Pengganda pajak proporsional

Karena hanya pajak yang berubah maka transfer dianggap nol.

$$kt = \frac{\Delta Y}{\Delta T_n} = \frac{-c}{(1-c+ct)}$$

$$\frac{\Delta Y}{20} = \frac{-0,8}{(1-0,8+0,8 \times 0,2)}$$

$$\frac{\Delta Y}{20} = -2$$

$$\Delta Y = -40$$

Adanya peningkatan pajak akan menurunkan pendapatan sebesar Rp 40.

10. Pengganda transfer pemerintah

Karena hanya transfer yang berubah, maka pajak dianggap tetap, sehingga

$$kt = \frac{\Delta Y}{\Delta T_n} = \frac{-c}{(1-c+ct)}$$

$$\frac{\Delta Y}{10} = \frac{-0,8}{(1-0,8+0,8 \times 0,2)}$$

$$\frac{\Delta Y}{-10} = -2$$

$$\Delta Y = 20$$

Adanya pengurangan transfer pemerintah akan meningkatkan pendapatan sebesar Rp20.

11. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa adanya peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 15; maka penurunan pendapatan nasional sebesar Rp 75 pada pajak lump-sum dan penurunan pendapatan nasional sebesar Rp37,5 pada pajak proporsional. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya penekanan pajak proporsional memiliki dampak pada perubahan pendapatan yang lebih kecil dibandingkan pada pajak lump-sum.

Istilah-istilah penting

- Pajak proporsional
- Pengganda pengeluaran pemerintah
- Pengganda pajak proporsional

Pertanyaan Jawaban Pendek

Gunakan informasi berikut untuk menjawab soal no.1 – no.4

Misalkan fungsi konsumsi = $300 + 0,80Y_d$, $I = 150$, $G = 250$, $Tr = 30$, dan pajak proporsional sebesar 0,15 .

1. Tentukan keseimbangan output!
2. Berapa besarnya penerimaan pajak pada saat keseimbangan! Jelaskan kondisi keseimbangan keuangan!
3. Tentukan keseimbangan output ketika terjadi peningkatan investasi dari 150 ke 200!
4. Bagaimana kondisi pajak dengan naiknya investasi tersebut!

Gunakan informasi berikut untuk menjawab soal no.5-8

Misalkan *marginal propensity to consume* adalah 0,75 dan fungsi pajak adalah 0.15Y. Bagaimana kondisi keseimbangan output untuk

5. Perubahan variabel pengeluaran pemerintah sebesar Rp20,
6. Peningkatan pajak sebesar Rp 15
7. Transfer pemerintah berkurang sebesar Rp 15

Pertanyaan Jawaban Benar Salah

1. Pajak yang besarnya tergantung dari pendapatan disebut dengan pajak proporsional
2. Peningkatan pajak yang bersifat proporsional menyebabkan perekonomian menjadi lebih besar
3. Formula $k_e = \frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{(1-c+ct)}$ merupakan formula untuk angka pengganda pajak proporsional
4. Formula $\frac{\Delta Y}{\Delta T_n} = \frac{-c}{(1-c+ct)}$ merupakan formula untuk angka pengganda pengeluaran pemerintah.
5. Jika besarnya pengeluaran pemerintah sama dengan pajak proporsional netto, maka angka penggandanya adalah $\frac{(1-c)}{(1-c+ct)}$

---000---

DAFTAR BACAAN

Boediono, 2001, *Ekonomi Makro Edisi 4: Seri Sinopsis-Pengantar Ilmu Ekonomi No.2*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.

Diulio, E. 1998, *Theory and Problems of Macroeconomics: Third Edition*, Mc.Graw-Hill, London.

Hubbard, R.G., O'Brien, A. P., 2015, *Economics Fifth edition*, Pearson, New York.

Mankiw, N.G., 2003, *Macroeconomics, Fifth Edition*, Worth Publisher, New York.

Stiglitz, J.E., *Principles of Macroeconomics:Second Edition*, W.W. Norton & Company, New York.

Sukirno, S., 2013, *Makroekonomi-Teori Pengantar:Edisi Ketiga*, Rajawali Press, Jakarta.

Wibowo, R., 2002, *Ekonomi Makro: Bahan Matrikulasi Mahasiswa Pascasarjana (S-2)* Program Studi Agribisnis Universitas Jember, Jember.